

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh:

LUTHFIAH HANIFAH
2320050006



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Luthfiah Hanifah**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2320050006**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik**
Judul Tesis : **Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Dengan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi**

Pengesahan Tesis:

Medan, 21 Agustus 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. Januri. S.E., M.M., M.Si

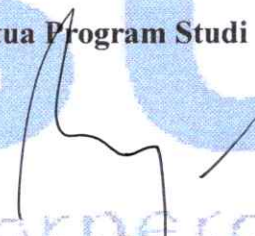

Prof. Dr. Zulia Hanum. S.E., M.Si

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum


Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

PENGESAHAN

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Luthfiah Hanifah
NPM :2320050006

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah Dipertahankan di Hadapan Penguji yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada Hari Senin, 04 Agustus 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. Sukma Lesmana, S.E., M.Si**
Ketua
2. **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si**
Anggota

1.

2.

3.

Unggul Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelarakademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2025

Penulis,



(Luthfiah Hanifah)
2320050006

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Luthfia Hanifah
Program Studi Magister Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, dengan efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SiPD) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik analisis data regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas akan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Selanjutnya, transparansi juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Variabel moderasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SiPD) memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran. Demikian pula, SiPD memoderasi hubungan antara transparansi dan kinerja pengelolaan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SiPD mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pengelolaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SiPD, Moderasi.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON BUDGET MANAGEMENT PERFORMANCE AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING, RESEARCH, AND DEVELOPMENT AGENCY OF NORTH SUMATRA PROVINCE WITH THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM AS A MODERATING VARIABLE

Luthfia Hanifah
Master's Program in Accounting

This study aims to analyze the influence of accountability and transparency on budget management performance at the Regional Development Planning, Research, and Development Agency of North Sumatra Province, with the effectiveness of the Regional Government Information System (SiPD) as a moderating variable. The study employs a quantitative associative approach using moderation regression analysis techniques. The research findings indicate that accountability has a positive and significant effect on budget management performance. This suggests that an increase in accountability will encourage improvements in budget management performance. Furthermore, transparency is also proven to have a positive and significant effect on budget management performance. The moderating variable of the Regional Government Information System (SiPD) strengthens the relationship between accountability and budget management performance. Likewise, SiPD moderates the relationship between transparency and budget management performance. These results demonstrate that the effectiveness of SiPD implementation can enhance the influence of accountability and transparency on improving budget management performance within local government institutions.

Keywords: Accountability, Transparency, Budget Management Performance, Regional Government Information System, SiPD, Moderation.

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dengan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi". Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU, untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Dengan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi”**.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang saya sayangi yang telah mecurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Kesehatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum** Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Akrim, S.H.,M.Pd** Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ruianto, S.Sos.,M.Si.,** Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum** selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.,** selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak **Assoc. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Komisi Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.

9. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Komisi Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.
10. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada sahabat saya di Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang telah turut membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan serta kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2025

LUTHFIAH HANIFAH

2320050006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Perumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	16
2.1.2 <i>Good Governance</i>	16
2.1.3 Akuntabilitas	19
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas.....	19
2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas.....	20
2.1.3.3 Dimensi dan Indikator Akuntabilitas	22
2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas.....	26
2.1.4 Transparansi	28
2.1.4.1 Pengertian Transparansi	28
2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Transparansi	29
2.1.4.3 Dimensi dan Indikator Transparansi	33
2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi.....	37
2.1.5 Kinerja Pengelolaan Anggaran.....	38
2.1.5.1 Pengertian Kinerja Pengelolaan Anggaran	38

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Pengelolaan Anggaran	41
2.1.5.3 Dimensi dan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran.....	43
2.1.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran.....	46
2.1.6 Efektivitas SiPD	47
2.1.6.1 Pengertian Efektivitas SiPD.....	47
2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Efektivitas SiPD	48
2.1.6.3 Dimensi dan Indikator Efektivitas SiPD	50
2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas SiPD.....	51
2.2 Penelitian Terdahulu	53
2.3 Kerangka Konesptual	65
2.4 Hipotesis	71
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
3.1 Jenis Penelitian	72
3.2 Definisi Operasional	72
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	73
3.4 Populasi dan Sampel	74
3.3.1 Populasi	74
3.3.2 Sampel	74
3.5 Teknik Pengumpulan Data	75
3.6 Uji Instrumen Penelitian.....	75
3.6.1 Uji Validitas	75
3.6.2 Uji Reabilitas	79
3.7 Teknik Analisis Data.....	80
3.7.1 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	81
3.7.2 Model Struktural atau <i>Inner Moder</i>	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	85
4.1 Gambaran Umum	85
4.2 Karakteristik Responden	86
4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	87
4.3.1 Akuntabilitias	87
4.3.2 Transparansi	92

4.3.3 Kinerja Pengelolaan Anggaran	96
4.3.4 Efektivitas SiPD	100
4.4 Hasil Analisis SEM	104
4.4.1 Analisis Model Pengukuran	106
4.4.2 Analisis Model Strukturan	113
4.5 Pembahasan	120
BAB V PENUTUP	142
5.1 Kesimpulan	142
5.2 Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	70
Gambar 4.1 Outer Loading	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	73
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	74
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	75
Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	76
Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Transparansi	77
Tabel 3.6 Uji Validitas Variabel Kinerja Pengelolaan Anggaran	77
Tabel 3.7 Uji Validitas Variabel Efektifitas SiPD	78
Tabel 3.8 Uji Reabilitas	79
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	86
Tabel 4.2 Persentase Jawaban Responden pada Variabel Akuntabilitas	87
Tabel 4.3 Persentase Jawaban Responden pada Variabel Transparansi	92
Tabel 4.4 Persentase Jawaban Responden pada Variabel Pengelolaan	96
Tabel 4.5 Persentase Jawaban Responden pada Variabel Efektivitas SiPD.....	100
Tabel 4.6 Nilai Loading Factor	107
Tabel 4.7 Nilai AVE	109
Tabel 4.8 Nilai <i>Cross Loading</i>	110
Tabel 4.9 Uji Reabilitas	112
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	114
Tabel 4.11 Uji Signifikan Pengaruh Langsung	116
Tabel 4.12 Uji Sinifikan Pengaruh Moderasi	117
Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran daerah merupakan elemen kunci dalam sistem pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan semakin berkembangnya tuntutan untuk menerapkan otonomi daerah yang lebih mandiri dan transparan, pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting. Salah satu instansi yang memiliki peran vital dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan anggaran di tingkat provinsi, Bappelitbang harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien pada Bappelitbang sangat penting untuk mendukung keberhasilan program-program pembangunan dan penelitian di daerah. Bappelitbang memiliki tugas strategis dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan yang berbasis pada hasil penelitian dan pengembangan teknologi, yang memerlukan alokasi anggaran yang tepat agar setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk prioritas yang paling mendesak dan berdampak, tetapi juga meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang juga bertanggung jawab terhadap riset dan pengembangan, pengelolaan anggaran yang optimal memungkinkan Bappelitbang untuk berinovasi dengan lebih baik dan menghasilkan kebijakan yang berbasis data, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial daerah.

Di era otonomi daerah yang semakin kompleks, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi sorotan penting. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Januri dan Alpi, 2024). Akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Nainggolan dan Abdullah, 2016). Hal ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2018) yang menekankan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor penting yang dapat memperkuat akuntabilitas tersebut.

Menurut (Fransisca et al., 2021) akuntabilitas mencakup penyajian laporan keuangan yang berisikan informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna serta dapat diakses oleh pihak yang menggunakan laporan tersebut. Sedangkan menurut (Lubis et al., 2022) akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan setiap aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suharyono, 2019), menyebutkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah. Peningkatan akuntabilitas akan menyebabkan proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dan evaluasi, menjadi lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan public dan mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Namun dalam implementasinya, akuntabilitas pengelolaan anggaran di Indonesia memang masih menghadapi berbagai kendala, seperti yang tercermin dalam berbagai temuan dan kasus yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah pengelolaan proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN). Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN, di mana terjadi pemblokiran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp 14,87 triliun. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala terkait

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Pernyataan kontradiktif antara berbagai pihak terkait status pembangunan IKN juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Di satu sisi, juru bicara OIKN sekaligus staff khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan tetap berfokus pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung. Namun di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengindikasikan adanya kendala progress akibat pemblokiran anggaran (KOMPAS.com, 2025).

Situasi ini mencerminkan adanya gap dalam sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, di mana terdapat perbedaan persepsi dan informasi antara berbagai pemangku kepentingan. Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran anggaran merupakan hal yang wajar dalam proses pencairan APBN, namun tetap diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional seperti IKN. Tanpa adanya sistem pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan, akan sulit untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (KOMPAS.com, 2025).

Pengelolaan anggaran pembangunan daerah memerlukan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi untuk memastikan efektivitas penggunaan dana publik. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk program bantuan sosial (bansos) guna membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi (cnbcindonesia.com, 2020).. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan serius dalam pengelolaan anggaran tersebut. Salah satu temuan utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana ribuan data dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) teridentifikasi ganda atau tidak valid, seperti mencantumkan warga yang telah meninggal dunia atau sudah pindah domisili tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan (cnbcindonesia.com, 2020). Selain itu, proses pendataan dan penyaluran bansos dinilai kurang transparan, yang memicu kecurigaan terhadap adanya intervensi politik serta potensi penyalahgunaan anggaran. Prosedur pengadaan barang untuk bansos pun tidak dijalankan secara akuntabel, di antaranya melalui penunjukan langsung kepada pihak ketiga tanpa proses yang sesuai regulasi. Minimnya pelibatan masyarakat dan pengawasan independen turut memperparah kondisi ini, karena distribusi bantuan menjadi sulit untuk dipantau secara objektif oleh publik. Temuan-temuan ini mengindikasikan lemahnya tata kelola anggaran bansos yang dapat menghambat efektivitas dan keadilan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah transparansi. Transparansi sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas setiap pengelolaan anggaran (Swandewi & Dewi, 2023). (Arifani et al., 2018) menyebutkan transparansi merupakan bentuk tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu mengenai kebijakan publik. Ketersediaan informasi yang akurat mengenai pengelolaan anggaran akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan efektifitas kinerja pengelolaan anggaran serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran dan memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya dengan tujuan pencapaian Pembangunan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yulita et al., 2023), menyebutkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran.

Pada tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas di salah satu direktorat Kementerian Dalam Negeri (kompas, 2024). Temuan tersebut meliputi pelaporan fiktif perjalanan dinas, penggunaan anggaran melebihi plafon yang telah ditetapkan, hingga adanya pertanggungjawaban biaya yang tidak disertai bukti valid. Dalam beberapa kasus, pegawai mencantumkan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya. Selain itu, kurangnya transparansi informasi terkait mekanisme pengajuan,

persetujuan, dan pelaporan anggaran perjalanan dinas membuat proses pengawasan internal menjadi lemah dan sulit ditelusuri secara akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas individu pegawai dalam mengelola anggaran belum optimal, ditambah tidak adanya sistem pelaporan digital yang real-time turut memperburuk tingkat transparansi di lingkungan kerja tersebut. Hal ini berimbas pada menurunnya kinerja pengelolaan anggaran secara keseluruhan, serta meningkatkan potensi inefisiensi dan kerugian negara.

Dalam pengelolaan anggaran, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan data keuangan serta menyajikan laporan keuangan pemerintah secara real time. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan mengelola sistem informasi yang memuat data pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah (Naida, 2024). Menurut (Dewi et al., 2023) implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Implementasi SIPD akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan anggaran berdasarkan data yang terintegrasi. Implementasi SIPD juga meningkatkan pengawasan publik dalam pengelolaan anggaran melalui penyajian data laporan keuangan secara real time, sehingga meningkatkan efektifitas kinerja pengelolaan anggaran.

Pengelolaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara memainkan peran

yang sangat krusial dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terutama berlaku dalam konteks pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan. Pada tahun 2024, pemerintah pusat telah menetapkan 10 proyek PSN yang mencakup berbagai sektor infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Proyek-proyek ini, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Utara dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan infrastruktur dan perekonomian daerah. Namun, meskipun ada pengumuman sebelumnya yang menyebutkan bahwa 10 PSN akan dikerjakan pada tahun 2025, Kepala Bappelitbang Sumatera Utara, memberikan klarifikasi bahwa kelanjutan proyek-proyek tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh pemerintah pusat, dan keputusan final belum diterima oleh pihak pemerintah daerah (waspada, 2025). Ketidakpastian mengenai status kelanjutan proyek-proyek strategis ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan anggaran. Mengingat dana yang terlibat sangat besar dan dampaknya signifikan terhadap pembangunan daerah, diperlukan sistem pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta meminimalisir potensi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Dengan adanya evaluasi terhadap PSN yang belum selesai, kinerja pengelolaan anggaran akan diuji dalam hal seberapa efektif anggaran tersebut dapat dialokasikan, dipertanggungjawabkan, dan diawasi.

Masalah yang ditemukan dalam fenomena ini berhubungan dengan rendahnya akuntabilitas dalam evaluasi dan pengawasan anggaran, yang disebabkan oleh ketidakmampuan sistem pengendalian internal dalam mengidentifikasi dan mencegah pemborosan serta penyimpangan. Temuan BPK yang mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan mendukung fakta bahwa proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan anggaran Bappelitbang tidak cukup efektif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penundaan proyek dan ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan. Selain itu, meskipun ada perbaikan dalam rasio realisasi anggaran, perencanaan anggaran yang dibuat kemungkinan besar tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, seperti yang terlihat dalam penundaan proyek pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini mencerminkan ketidakefektifan dalam implementasi pengelolaan anggaran yang menyebabkan proyek terlambat atau tidak selesai sesuai dengan harapan. Kesenjangan dalam transparansi dan pengelolaan anggaran juga menjadi masalah yang menghambat keberhasilan implementasi program pembangunan, karena akuntabilitas yang rendah memperburuk pengelolaan anggaran dan menurunkan efektivitas proyek. Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, meskipun terdapat perbaikan dalam rasio realisasi anggaran. Masalah utama yang harus diatasi adalah transparansi dalam pengalokasian anggaran, pengawasan yang lebih efektif, serta evaluasi

akuntabilitas yang lebih ketat agar anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan yang nyata di daerah.

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SiPD) memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. SiPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dengan memberikan akses informasi yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memanfaatkan SiPD yang efektif, seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat dipantau dan diakses oleh pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran atau manipulasi data, serta mencegah potensi kolusi atau korupsi, karena informasi terkait pengalokasian dan penggunaan anggaran serta status pelaksanaan proyek dapat diketahui secara terbuka dan real-time (Darmasto dan Saputro, 2024).

Selain itu, SiPD yang efektif juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan menyediakan data yang valid dan terperinci tentang bagaimana anggaran dikelola dan digunakan, sistem ini dapat memberikan jejak audit (audit trail) yang memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa pengelola anggaran bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan anggaran yang diambil (Pangestu, 2023). Dengan SiPD yang berfungsi dengan baik, seluruh pengeluaran anggaran akan tercatat dan dapat dilacak, sehingga memungkinkan auditor atau pihak berwenang melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi jika ada

penyimpangan atau pemborosan dalam penggunaan anggaran. SiPD juga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengelolaan anggaran seringkali menemui kendala karena pengawasan yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan pemborosan atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan (Manoe dan Rozady, 2023).

SiPD menyediakan informasi real-time yang berbasis data, sehingga pengawasan terhadap proses pengeluaran anggaran dapat dilakukan secara berkesinambungan. Ketika laporan anggaran tersedia secara akurat dan tepat waktu, pengawas dapat dengan mudah mengetahui jika terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan. SiPD juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, yang dapat membantu pengambil keputusan merencanakan dan mengalokasikan anggaran dengan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah (Manoe dan Rozady, 2023). Data analitik yang disediakan oleh SiPD memungkinkan untuk mengevaluasi apakah alokasi anggaran telah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Jika terdapat kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan nyata, keputusan untuk mengalokasikan ulang anggaran dapat diambil dengan lebih tepat, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas karena setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar data yang jelas (Pangestu, 2023).

Secara keseluruhan, efektivitas SiPD berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tanpa sistem informasi yang baik dan berfungsi optimal, pengelolaan anggaran dapat

terhambat oleh ketidakjelasan, keterlambatan dalam pelaporan, serta kurangnya pengawasan terhadap aliran dana. Oleh karena itu, keberhasilan SiPD sangat bergantung pada penerapan teknologi yang tepat dan keterlibatan semua pihak dalam memanfaatkan sistem tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dipahami bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara. Kompleksitas antara mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan anggaran menciptakan dinamika yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta urgensi untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengelolaan anggaran. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan anggaran daerah menjadi sangat relevan dan krusial untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dengan efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif, serta mendukung pemahaman mendalam tentang transformasi pengelolaan anggaran daerah di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengelolaan anggaran, tetapi juga

memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka dapat ditarik identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, ketidakpatuhan terhadap peraturan, pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan rencana, dan kurangnya evaluasi terhadap penggunaan anggaran.
2. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, seperti keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan atau ketidaksesuaian antara data yang disajikan dengan kondisi nyata di lapangan
3. Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada suatu penelitian bertujuan untuk menghindari pembahasan dan analisa yang dilakukan tidak keluar dari topik penelitian. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan realisasi anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara yang dimoderasi dengan efektifitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian teori dan latar belakang masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Efektifitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Efektifitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah memoderasi pengaruh Transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian teori, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam memoderasi pengaruh Transparansi

terhadap kinerja pengelolaan anggaran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah:.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dan sumber pengetahuan dalam manajemen pengelolaan anggaran.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam peningkatan efektifitas kinerja pengelolaan anggaran.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam penerapan dasar-dasar pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pengelolaan anggaran.
 - b. Bagi pembaca diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menempatkan pemerintah desa sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Teori ini menekankan pada komitmen aparatur desa, baik kepala desa maupun perangkat desa, untuk mengelola sumber daya desa demi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, aparatur desa dianggap sebagai pengelola yang bertanggung jawab (*steward*) atas aset-aset desa yang dipercayakan kepadanya (Suwanti & Hermanto, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, teori *stewardship* sangat relevan karena sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan daerah. Implikasinya adalah bahwa aparatur daerah diharapkan dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam mengadopsi teknologi informasi, serta mampu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat, dan pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 *Good Governance*

Governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan sumber daya yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam

mencapai tujuan bersama. Tata kelola merupakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sikap dan perilakunya harus menerapkan *good governance* berarti pemerintah itu didasari pada prinsip-prinsip keikutsertaan, supremasi hukum, transparansi, kritis, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling berkaitan (Saragih dan Alpi, 2023). Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh warga negara (Marniati & Fiddin, 2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka karakteristik *good governance* dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku *good governance*. Salah satu cara untuk membentuk dan meningkatkan produktivitas menuju pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem manajemen kinerja. Secara *teori good governance* menekankan pada proses pengelolaan pemerintah dengan adanya pemangku kepentingan yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta juga ikut terlibat dalam mendayagunakan sumber daya yang ada meliputi alam dan manusia ataupun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing (R. P. Sari et al., 2023)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap.MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi. Dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia pemerintah senantiasa memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, hal ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Surat Edaran Mendagri Tahun 910/1867/SJ tentang transaksi pembayaran non tunai pada pemerintah Kabupaten/Kota (Marniati & Fiddin, 2023). Mardiasmo (2007:114) dalam (Annisa, 2017) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Mardiasmo dalam (Auditya et al., 2021) mengatakan bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah. Era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (*accountability*) dan

keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran yang participative (Auditya et al., 2021).

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas, yang berasal dari bahasa Inggris "*accountability*", mengacu pada tanggung jawab atau kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambilnya (Silvia dan Hanum, 2024). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan anggaran dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik. Untuk dapat menjawab segala hal tentang langkah-langkah dari semua keputusan dan proses yang dilakukan, serta bertanggung jawab atas hasil kinerjanya (Merchilia & Robinson, 2024). Setiana dan Yuliani (2017:206) dalam (Kromen et al., 2023), memaparkan bila

akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang amanah guna bertanggung jawab terkait penyajian, pelaporan, dan pengungkapan bermacam aktivitas sebagai pertanggungjawaban ke pihak yang memberi amanah yang berhak dan berkewenangan terhadap pertanggungjawaban itu. Sesuai Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip akuntabilitas, seperti:

1. Keterbukaan terkait kapabilitas organisasi menyampaikan realitas terkait kinerja.
2. Kewajiban terkait metode organisasi dalam mengatasi konsekuensi kinerja mereka.
3. Mampu mengendalikan, terkait upaya menyelesaikan tugas yang sudah diperoleh.
4. Pertanggungjawaban terkait standar kinerja yang ditentukan.
5. Respons terkait upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas

Tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong, terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja. Menurut Herbert, Killough dan Stretss dalam (Nasirwan, 2017) untuk:

1. Menentukan tujuan yang tepat.

Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur adalah langkah pertama dalam akuntabilitas. Tujuan ini harus relevan dengan visi dan misi organisasi. Dengan tujuan yang tepat, semua anggota organisasi memiliki arah yang jelas untuk dicapai. Tujuan yang spesifik akan membantu dalam

menentukan prioritas serta memberikan fokus dalam pelaksanaan tugas yang lebih terarah.

2. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan standar atau kriteria yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Standar ini bisa berupa prosedur, kebijakan, atau norma yang digunakan untuk menilai kemajuan dan hasil yang dicapai. Standar ini harus objektif dan dapat diukur agar kinerja dapat dievaluasi secara efektif.

3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

Penerapan standar yang telah ditetapkan memerlukan promosi yang efektif di dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi pelatihan, pengarahan, dan sosialisasi kepada anggota organisasi agar mereka memahami pentingnya standar tersebut. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa standar diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat.

4. Mengembangkan Standar Organisasi dan Operasi Secara Ekonomis dan Efisien

Standar yang dikembangkan harus tidak hanya efektif tetapi juga ekonomis dan efisien. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar tersebut harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak membebani organisasi. Pengembangan standar harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal,

sehingga proses dan operasional organisasi dapat berjalan dengan baik tanpa pemborosan.

Akuntabilitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan adanya akuntabilitas, berbagai manfaat dapat diperoleh, antara lain (Prihatin & Mustaqim, 2023):

1. Instansi pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin terdorong, karena masyarakat merasa memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, karena mereka merasa bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

2.1.3.3 Dimensi dan Indikator Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh para lembaga publik menurut Hoopwood dan Tamkins yaitu (Prihatin & Mustaqim, 2023):

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probility and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perhindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Indikator dari dimensi meliputi:

a. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Hukum yang Berlaku

Indikator pertama adalah sejauh mana organisasi atau individu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah operasionalnya. Kepatuhan ini dapat dilihat dari dokumentasi yang lengkap, izin usaha yang sah, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang sah dan relevan, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Transparansi ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana informasi tentang keputusan tersebut dapat diakses oleh publik atau pihak yang berkepentingan.

c. Penegakan Kebijakan Etika dan Kejujuran

Dimensi ini juga mencakup sejauh mana kebijakan internal terkait etika dan kejujuran diterapkan. Indikatornya dapat berupa pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas,

serta adanya sistem pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dalam praktik.

2. Akuntabilitas proses (*proces accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang sudah melaksanakan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi. Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Transparansi Proses

Informasi mengenai bagaimana keputusan dibuat, prosedur yang diterapkan, dan langkah-langkah yang diambil harus terbuka untuk evaluasi oleh pihak yang berkepentingan.

b. Kepatuhan terhadap Prosedur dan Regulasi

Proses harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil sah dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Proses harus diawasi secara efektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Evaluasi berkala membantu untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam setiap tahapan. Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang mermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

a. Partisipasi pemangku kepentingan

Melibatkan pihak terkait, seperti masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan yang ada.

b. Tindak lanjut terhadap temuan audit

Program harus siap menindaklanjuti temuan dari audit atau evaluasi untuk memperbaiki kekurangan atau masalah yang ditemukan.

c. Ketersediaan sistem pengaduan

Adanya saluran bagi masyarakat atau pihak terkait untuk melaporkan penyimpangan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan (*polici accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

a. Responsibilitas

Kemampuan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan keputusan kebijakan kepada publik, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

b. Keterlibatan Publik

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan proses evaluasi kebijakan, serta sejauh mana suara masyarakat diakomodasi dalam keputusan tersebut.

c. Perbaikan Berkelanjutan

Kemampuan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi atau umpan balik yang diterima dari masyarakat dan stakeholder lainnya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan (Kromen et al., 2023), Akuntabilitas berdampak positif dan krusial bagi kinerja anggaran, dimana dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban berdampak signifikan bagi kinerja anggaran. Hal tersebut juga disampaikan dalam penelitian Rakhmawati (2018), hasil penelitian memaparkan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola dana bantuan operasional sekolah.

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi, terutama yang berhubungan dengan tata kelola publik dan pemerintahan. Beberapa ahli telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam konteks organisasi, baik itu di sektor publik maupun sektor swasta. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas menurut Robinson (2010), yang menekankan pentingnya transparansi, kejelasan peran, serta mekanisme pengawasan yang efektif dalam memastikan pertanggungjawaban kinerja organisasi berjalan dengan baik.

1. Transparansi

Transparansi mengacu pada sejauh mana informasi yang relevan dan penting dapat diakses oleh publik atau pemangku kepentingan. Organisasi yang terbuka dalam mengungkapkan informasi terkait operasional, keuangan, dan kebijakan mereka cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Menurut Robinson (2010), transparansi adalah salah satu syarat utama untuk akuntabilitas, karena tanpa akses informasi yang memadai, pihak yang berkepentingan tidak dapat memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara efektif.

2. Keterlibatan Publik (Public Participation)

Akuntabilitas sangat bergantung pada sejauh mana publik atau pemangku kepentingan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Keterlibatan publik menciptakan tekanan eksternal yang mendorong organisasi untuk lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang jelas dan terbuka memudahkan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas dan sistem pelaporan yang efektif cenderung lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada atasan maupun publik.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

Sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, sangat mempengaruhi akuntabilitas. Lindstedt & Naurin (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat bergantung pada adanya mekanisme pengawasan yang independen dan kredibel, yang dapat memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang mendukung etika kerja, keterbukaan, dan integritas memainkan peran penting dalam mendukung akuntabilitas. Organisasi yang memiliki budaya yang kuat dalam hal kejujuran dan transparansi akan lebih mungkin menjalankan akuntabilitas dengan baik.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini berarti pemerintah berkewajiban untuk secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya public (Hani dan Alpi, 2022). Keterbukaan ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga perwakilan rakyat. Informasi yang harus dipublikasikan meliputi anggaran pemerintah, pelaksanaan proyek, penggunaan dana, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah,

memberikan masukan, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan bersama. Transparansi juga merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Transparansi

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan adalah (Nasirwan, 2017)

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol social.

Penekanan pada pencegahan penyimpangan sejak dini melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Kontrol sosial yang efektif dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pengawasan terhadap perilaku yang menyimpang dari norma atau aturan yang berlaku. Edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama agar masyarakat paham akan dampak penyimpangan dan pentingnya mengikuti nilai-nilai sosial yang ada. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pengawasan sosial dan menanggulangi penyimpangan lebih awal.

2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.

Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami informasi yang disampaikan dengan cara yang sama. Kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi dapat menimbulkan konflik atau kebingungannya tujuan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kembali pesan yang disampaikan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta menggunakan cara komunikasi yang mudah dipahami dan bebas dari ambiguitas.

3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Masyarakat perlu diajak untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil dan kegiatan yang dilaksanakan. Pembelajaran mengenai prinsip tanggung jawab ini membantu masyarakat untuk lebih peduli terhadap dampak dari tindakan mereka. Dengan rasa tanggung jawab yang kuat, masyarakat akan lebih hati-hati dalam bertindak dan siap untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dibuat, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi.

4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Kepercayaan antar individu atau pihak terkait sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik itu dalam organisasi, pemerintahan, atau masyarakat umum. Membangun kepercayaan memerlukan integritas, konsistensi, dan komunikasi yang jujur. Ketika semua pihak merasa aman

dan dihargai, maka kegiatan tersebut akan berjalan lebih lancar dan menghasilkan hasil yang positif. Proses ini dapat dilakukan dengan menjaga hubungan baik, menghormati hak-hak individu, serta bertindak adil dalam setiap keputusan.

5. Penerapan prinsip transparansi memberikan sejumlah manfaat signifikan.

Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan memberikan kejelasan dan keterbukaan informasi kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akuntabilitas. Manfaatnya mencakup peningkatan kepercayaan masyarakat, pengurangan potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi, serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya kegiatan.

Adapun beberapa manfaat transparansi menurut (Himawan Pradipta et al., 2022) yaitu:

1. Transparansi dapat menjadi benteng pencegahan korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan sumber daya publik secara lebih efektif. Tindakan korupsi yang cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan lebih sulit dilakukan dan lebih mudah terdeteksi.
2. Transparansi memungkinkan identifikasi yang lebih mudah terhadap kelemahan dan kekuatan suatu kebijakan. Dengan adanya umpan balik dari

masyarakat, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala.

3. Transparansi meningkatkan akuntabilitas lembaga. Masyarakat dapat dengan mudah mengukur kinerja lembaga berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini mendorong lembaga untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen lembaga untuk mengambil keputusan tertentu akan meningkat. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan transparan, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga akan semakin besar.
5. Transparansi dapat menguatkan kohesi sosial. Dengan adanya kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, ikatan sosial akan menjadi lebih erat.
6. Transparansi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di suatu negara atau daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena mereka merasa lebih aman dan yakin akan kepastian hukum.

Penerapan prinsip transparansi memberikan berbagai manfaat penting, antara lain mencegah korupsi dengan memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran dan sumber daya publik. Transparansi juga mempermudah identifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, serta mendorong evaluasi dan perbaikan. Selain itu, transparansi meningkatkan akuntabilitas lembaga,

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, dan mempererat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, transparansi menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, menarik minat investor yang mencari kepastian hukum dan keamanan (Himawan Pradipta et al., 2022).

2.1.4.3 Dimensi dan Indikator Transparansi

Menurut Yanti et al., (2018) transparansi memiliki beberapa indikator dimensi dan indikator, yaitu:

1. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah aspek yang memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup penyediaan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya, serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau dihalangi. Indikator dimensi ini mencakup:

a. Ketersediaan Informasi

Informasi yang relevan dan penting harus tersedia untuk publik secara mudah diakses. Hal ini mencakup laporan keuangan, kebijakan, keputusan, dan data yang berhubungan dengan operasional atau aktivitas organisasi.

b. Aksesibilitas Informasi

Informasi harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk digital (misalnya di website resmi) maupun fisik.

c. Keterbukaan Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan bisa dipantau oleh publik, sehingga dapat dilihat dengan jelas dasar atau pertimbangan yang digunakan dalam membuat keputusan.

2. Keputusan yang Jelas

Keputusan yang jelas merujuk pada proses pengambilan keputusan yang transparan, yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat atau yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Keputusan harus disampaikan dengan alasan yang kuat, bukti yang jelas, dan penjelasan yang logis. Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Dasar Keputusan yang Terbuka

Setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dijelaskan kepada publik. Ini mencakup informasi mengenai alasan di balik keputusan, data atau fakta yang digunakan, serta referensi atau aturan yang mendasari keputusan tersebut.

b. Keterlibatan Pihak Terkait

Proses pengambilan keputusan harus melibatkan pihak-pihak yang relevan dan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi, memberikan masukan, atau sekadar memahami alasan di balik keputusan yang diambil.

c. Dokumentasi Keputusan

Keputusan yang diambil harus didokumentasikan dengan jelas, mencakup detail yang memadai seperti siapa yang membuat keputusan,

kanan keputusan tersebut diambil, dan apa dampaknya. Dokumentasi ini bisa dalam bentuk laporan atau notulen yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan bagi publik untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses yang relevan. Ini berarti bahwa informasi harus dapat diakses melalui berbagai saluran yang mudah dijangkau, baik itu secara langsung atau melalui media elektronik. .

Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Penyediaan Saluran Komunikasi yang Mudah Diakses

Tersedia berbagai saluran komunikasi (telepon, email, aplikasi, platform sosial media) yang dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk yang membutuhkan bantuan khusus, seperti penggunaan bahasa isyarat atau teks.

b. Penggunaan Teknologi Aksesibilitas

Penggunaan teknologi asistif yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan atau informasi, misalnya pembaca layar untuk penyandang tunanetra, subtitle untuk tunarungu, atau desain yang ramah pengguna.

c. Penyebaran Informasi Secara Merata

Informasi mengenai layanan atau fasilitas yang dapat diakses disebarluaskan ke berbagai kalangan tanpa ada diskriminasi atau pengecualian.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam konteks transparansi berarti bahwa prinsip-prinsip transparansi harus diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan yang terbuka dan jelas harus menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik organisasi. . Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Konsistensi Pengungkapan Informasi

Informasi yang relevan harus disampaikan secara konsisten dan teratur, misalnya laporan tahunan, laporan keuangan, dan hasil evaluasi program yang dapat diakses oleh publik atau stakeholder yang berkepentingan.

b. Proses Pengambilan Keputusan yang Terbuka

Keputusan penting yang mempengaruhi kebijakan organisasi harus dilakukan melalui proses yang terbuka, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menyediakan ruang untuk masukan serta feedback.

c. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Keberlanjutan transparansi dapat diukur melalui evaluasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan terus memenuhi standar transparansi yang telah ditetapkan.

2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi, terutama dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik. Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya tentang kebijakan, keputusan, serta proses yang dilakukan oleh organisasi. Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat transparansi dalam organisasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi menurut Boven (2007):

1. Akses terhadap Informasi

Bovens (2007) menjelaskan bahwa transparansi sangat bergantung pada seberapa mudahnya informasi yang relevan dapat diakses oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tanpa akses yang memadai, masyarakat atau pemangku kepentingan tidak dapat melakukan pengawasan atau evaluasi yang efektif terhadap organisasi. Akses terhadap informasi yang terbuka dan mudah diakses meningkatkan tingkat transparansi dalam suatu organisasi.

2. Komitmen Organisasi terhadap Keterbukaan

Komitmen organisasi terhadap prinsip keterbukaan sangat mempengaruhi tingkat transparansi. Organisasi yang secara proaktif menyediakan informasi yang relevan dan mengkomunikasikan keputusan-keputusan mereka secara terbuka menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Hal

ini juga mencakup pemberian informasi yang tepat waktu dan akurat, serta menghindari pengaburan data atau informasi yang tidak diperlukan.

3. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah juga memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi. Piotrowski & Van Ryzin (2007) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang memaksa organisasi untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada publik sangat berpengaruh pada tingkat transparansi. Peraturan yang mengharuskan organisasi untuk melaporkan kegiatan atau penggunaan dana publik dengan jelas mendorong transparansi yang lebih besar.

4. Teknologi Informasi dan Sistem Digital

Kemajuan teknologi informasi memfasilitasi transparansi dengan memberikan saluran yang lebih efisien untuk menyebarkan informasi. Teknologi yang memungkinkan publik untuk mengakses data secara real-time, misalnya melalui portal pemerintah atau sistem manajemen informasi publik, dapat meningkatkan transparansi secara signifikan. Dengan adanya platform digital, organisasi dapat lebih mudah berbagi informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

2.1.5 Kinerja Pengelolaan Anggaran

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Pengelolaan Anggaran

Laporan keuangan dalam akuntansi sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan penyajian yang

sistematis tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan merupakan laporan hasil (output) sedangkan masukannya (input) berupa transaksi bisnis. Supaya masuk ke dalam sistem pencatatan, maka keseluruhan input harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi (Ridzal, 2020).

Pengelolaan anggaran merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara, artinya pengelolaan keuangan di tingkat daerah itu saling berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan di tingkat nasional.. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019: 11) menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Anggaran pasal 1 ayat 6, yang dimaksud Pengelolaan Anggaran adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran, maka banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah kompetensi dan motivasi pegawai.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang anggaran yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah, yaitu (Mahesa & Astawa, 2024):

1. Rasio kemandirian anggaran, Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.
2. Rasio efektivitas dan efisien anggaran, Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
3. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien,
4. Rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan, Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dilokasikan untuk belanja rutin berarti persentase

belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

5. Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Pengelolaan Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan beberapa tujuan utama dalam pengelolaan anggaran, yaitu (Novelya Suoth et al., 2016):

1. Pengelolaan anggaran harus bertanggung jawab (*accountability*).

Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Artinya, setiap penggunaan anggaran atau dana daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Hal ini mencakup laporan keuangan yang lengkap dan benar, serta mekanisme audit yang terbuka untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengelolaan keuangan harus mampu memenuhi kewajiban anggaran.

Pemerintah daerah harus mampu memenuhi kewajiban keuangan yang timbul dari kewenangannya, seperti membayar utang daerah, mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, serta memenuhi kewajiban lain yang ada. Ini mencakup kewajiban

pembayaran gaji pegawai daerah, pelaksanaan program pembangunan, dan pemenuhan kewajiban fiskal lainnya.

3. Prinsip kejujuran menjadi sangat penting dalam pengelolaan anggaran.

Kejujuran merupakan dasar yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam praktek korupsi, penyalahgunaan dana, atau manipulasi anggaran. Pengelolaan yang jujur akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

4. Pengelolaan keuangan harus efektif dan efisien.

Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan cara yang dapat menghasilkan manfaat yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Artinya, setiap alokasi anggaran dan penggunaan dana harus diarahkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minim. Efektivitas dan efisiensi ini akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

5. Pengelolaan anggaran harus memiliki sistem pengendalian mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan.

Untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, perlu adanya sistem pengendalian yang baik. Pengendalian internal yang efektif, termasuk prosedur verifikasi anggaran, audit, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala, harus diterapkan. Ini bertujuan

untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik adalah pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.1.5.3 Dimensi dan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran

Dimensi dan indikator kinerja pengelolaan anggaran merujuk pada elemen-elemen yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa dimensi dan indikator yang umumnya digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran. Ada beberapa dimensi Kinerja Pengelolaan Anggaran:

1. Efektivitas

Mengukur sejauh mana tujuan pengelolaan anggaran tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Pencapaian target anggaran

Sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Penyerapan anggaran

Tingkat penyerapan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

c. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran

Mengukur selisih antara alokasi anggaran dan realisasi pengeluaran dalam mencapai hasil yang telah direncanakan.

2. Efisiensi

Menilai sejauh mana penggunaan sumber daya keuangan dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Perbandingan antara biaya dan hasil

Membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

b. Rasio antara pengeluaran dan penerimaan

Mengukur sejauh mana pengeluaran daerah dapat memberikan penerimaan yang optimal.

c. Penggunaan teknologi dan inovasi

Mengukur sejauh mana penggunaan teknologi dapat menekan biaya dalam pengelolaan anggaran.

3. Kepatuhan

Menilai sejauh mana pengelolaan anggaran telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perundang-undangan maupun ketentuan administratif. Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Menilai sejauh mana pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepatuhan terhadap prosedur administrative

Mengukur kepatuhan terhadap prosedur administratif yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan.

c. Audit dan pengawasan internal

Sejauh mana pengelolaan anggaran diawasi dengan baik oleh instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

4. Transparansi

Mengukur sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan dengan terbuka, sehingga informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator dari dimensi ini meliputi:

- a. Aksesibilitas informasi keuangan: Sejauh mana informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk laporan keuangan yang jelas dan terbuka.
- b. Pelaporan secara rutin dan akurat: Laporan keuangan yang disampaikan kepada publik secara rutin, akurat, dan mudah dipahami.
- c. Keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa: Sejauh mana pengadaan barang/jasa dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Akuntabilitas

Menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak terkait lainnya. Indikator dari dimensi ini meliputi:

- a. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran
Sejauh mana penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- b. Penerimaan laporan keuangan oleh public

Sejauh mana laporan keuangan diterima dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak berwenang serta masyarakat.

c. Pengawasan eksternal

Adanya pengawasan eksternal seperti audit yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran yang baik adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Kinerja pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal organisasi maupun faktor eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Lindstedt & Naurin (2010) menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen yang sangat memengaruhi kinerja pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang transparan memungkinkan publik untuk memantau penggunaan dana, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas keputusan dan penggunaan anggaran.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang berkualitas merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Sisman (2009) menekankan bahwa kinerja pengelolaan anggaran sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme aparatur

pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten, pengelolaan keuangan akan kurang optimal.

3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Kieso et al. (2008) mengungkapkan bahwa keberadaan dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran. Sistem pengendalian ini mencakup prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

2.1.6 Efektivitas SiPD

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas SiPD

Sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan makin bernilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang dapat berjalan secara online memudahkan penggunanya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja. Dan sistem informasi yang dibangun tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Itulah yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah

(informasi pembangunan Daerah dan Informasi Anggaran) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya (Dewi et al., 2023). Selain itu penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi penegakan berbagai peraturan di bidang pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, antara lain keekonomian, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas.

Pelaksanaan SIPD sendiri telah berjalan semenjak 2020 ketika sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk informasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian Dona Primasari (2017), menyatakan bahwa implementasi SIKD dapat membantu pekerjaan lebih efisien dan selaras dengan kesesuaian tugas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan SIKD akan meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh (Mustaqmah & Putri, 2022), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya (Nadir & Hasyim, 2017), juga menyatakan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah akan tinggi jika memiliki sistem informasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Efektivitas SiPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan

kualitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta perencanaan pembangunan. Berikut adalah tujuan dan manfaat SIPD menurut

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

SIPD membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan, yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

SIPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi, yang memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan.

3. Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan

Dengan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi, SIPD memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi yang akurat.

4. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

SIPD dirancang untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja mereka, baik dalam hal penyusunan anggaran, laporan keuangan, maupun pengelolaan proyek pembangunan.

Adapun manfaat dari SIPD:

1. Peningkatan Pengelolaan Anggaran

SIPD membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, memudahkan pelaporan anggaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan atau kebocoran anggaran.

2. Kemudahan dalam Monitoring dan Evaluasi

Dengan SIPD, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, serta mengidentifikasi hambatan atau potensi masalah secara lebih dini.

3. Pemenuhan Standar Pelaporan

SIPD membantu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi

SIPD memfasilitasi integrasi data antar instansi yang berbeda, sehingga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan.

5. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian

SIPD memungkinkan adanya sistem pengendalian yang lebih ketat dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, sehingga mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik.

2.1.6.3 Dimensi dan Indikator Efektivitas SiPD

SiPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pembangunan di daerah. Dimensi dan indikator SiPD biasanya berhubungan dengan aspek-aspek penting dalam

pembangunan daerah yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Dimensi SiPD umumnya meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Dimensi Ekonomi

Mengukur kondisi ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan ekonomi. Indikator dari dimensi ini meliputi:

2. Dimensi Sosial

Mengukur kualitas hidup masyarakat, tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Indikator dari dimensi ini meliputi:

3. Dimensi Lingkungan

Menilai kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, serta pengurangan kerusakan lingkungan. Indikator dari dimensi ini meliputi:

4. Dimensi Pemerintahan

Menilai efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dalam hal pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan anggaran. Indikator dari dimensi ini meliputi:

5. Dimensi Infrastruktur

Mengukur tingkat pembangunan infrastruktur seperti transportasi, energi, air bersih, dan fasilitas umum lainnya.

2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas SiPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu perangkat yang penting dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, perencanaan pembangunan, serta administrasi pemerintahan di tingkat

daerah. SIPD berfungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di pemerintahan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kinerja SIPD di pemerintah daerah:

1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Kebijakan yang jelas dan mendukung implementasi SIPD sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem ini. Piotrowski & Van Ryzin (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan SIPD sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dalam hal regulasi terkait keamanan data, privasi, serta integrasi antar sistem yang ada di instansi pemerintah. Kebijakan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat kinerja SIPD.

2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Lindstedt & Naurin (2010) menyatakan bahwa infrastruktur TIK yang memadai sangat berpengaruh terhadap kinerja SIPD. Infrastruktur yang baik mencakup jaringan internet yang cepat dan stabil, perangkat keras yang memadai, serta perangkat lunak yang terintegrasi dengan sistem yang ada di pemerintahan daerah. Tanpa infrastruktur TIK yang baik, sistem informasi pemerintahan daerah tidak dapat berfungsi dengan optimal.

3. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

Bovens (2007) berpendapat bahwa komitmen dan dukungan pimpinan daerah sangat berperan dalam keberhasilan implementasi SIPD. Tanpa

adanya dukungan dari pimpinan daerah, seperti kepala daerah atau pejabat terkait, SIPD mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya. Dukungan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem.

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul, Nama Jurnal, Hal, link web Jurnal	Teori/Penelitian/Fenomena	Kesimpulan/Penyataan Pakar/Pernyataan Teori
Suharyono, (2019)	The Effect of Accountability, Transparency, and Supervision on Budget Performance by Using the Concept of Value for Money in Regional Business Enterprises (BUMD) of Riau Province International Journal of Public Finance	Penelitian asosiatif kasual. Tidak efektifnya fungsi perencanaan dan pengendalian serta prinsip transparansi dan akuntabilitas menunjukkan BUMD di Provinsi Riau masih minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah,
Boyoh et al., (2022)	Analisis Penerapan Good Governance Dalam Penyusunan Anggaran Skpd Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"	Teori penetapan tujuan, teori agensi, good governance Penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif Berdasarkan data dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kota Bitung tahun anggaran 2020 dan 2021 masih ditemui kesalahan dalam hal penganggaran pada beberapa SKPD di lingkup Pemerintah	Penerapan Good Governance dalam aspek Partisipasi sudah di mulai dari Masyarakat tingkat kelurahan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tanggung jawab dalam menyusun setiap anggaran yang di ajukan oleh SKPD. Prinsip Keterbukaan/transparansi (transparency) dalam penerapan

		Kota Bitung.	Good Governance untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung telah transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat
Fransisca et al., (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu Jurnal Fairness 10.33369/fairness.v8i3.15207	Teori pertanggung-jawaban dan Penganggaran berbasis kinerja Penelitian asosiatif kasual. Realisasi penyerapan anggaran APBD masih di bawah harapan, yakni sebesar 29,76 persen, akibat penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah masih rendah.	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja
Yulita et al., (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur Jurnal Kolaboratif Sains 10.56338/jks.v6i12.4586	Penelitian deskriptif dan verifikatif Pengelolaan dana kelurahan yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan partisipasi seringkali diabaikan, dimana keberadaan ketiga prinsip ini tidak sejalan bersamaan dalam penerapannya	Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Partisipasi masyarakat

			mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.
Mudhofar, (2022)	Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 10.17509/jrak.v10i1.36763	Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan dan berpotensi terjadi penyimpangan	Tahap perencanaan dilaksanakan secara baik dengan mengedepankan azas partisipatif dan transparansi pada masyarakat. Tahap pelaksanaan dikerjakan secara baik dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas dan value for money Tahap penatausahaan dilaksanakan secara baik dengan telah diadministrasikan seluruh transaksi tahap pelaporan dilaksanakan secara baik dengan mekanisme yang telah ditentukan tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara baik dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Perdes
Lubis et al., (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas	Penelitian asosiatif kasual. Teori Good	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran secara

	Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020 Serambi Konstruktivis 10.32672/konstruktivis.v4i2.4707	Government Masih terdapatnya fluktuasi pada kinerja anggaran DP3AP2KB pada tahun 2016-2020.	simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB)
(Harnovinsah et al., (2020)	Effect of accountability, transparency and supervision on budget performance Utopia y Praxis Latinoamericana 10.5281/zenodo.4009622	Teori New Public Management dan Public Finance Penelitian asosiatif kasual Berdasarkan laporan BPK terdapat ketidak efisienan dan ketidak efektifan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2015-2017	Akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money.
Purnamasari et al., (2024)	The Role of the Internal Control System in Strengthening the Relationship between the Use of Information Technology, Accountability, and Village Government Performance Proceedings of the International Conference on Sustainability in	Teori Agensi Penelitian asosiatif kasual Kinerja pemerintah desa yang tergolong masih buruk khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dimana akuntabilitas	Sistem pengawasan internal dapat memperkuat hubungan antara system informasi teknologi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa.

	Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters, ICOSTELM 10.4108/eai.4-11-2022.2329847	dan pengungkapan dana desa masih belum mengikuti peraturan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.	
R. Sari et al., (2021)	The Role of Internal Control System on Characteristics of Village Financial Reports 10.24912/ja.v25i2.807	Teori agensi Penelitian asosiatif kasual Masih tingginya tingkat korupsi pengelolaan dana desa yang disebabkan tahap perencanaan yang tidak matang serta pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.	Variabel system pendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan desa.
Hidayati et al., (2023)	Accountability in Village Government: The Role of the Internal Control System as Moderation Journal of Business and Social Review in Emerging Economies 10.26710/jbsee.v9i2.2597	Penelitian asosiatif kasual Tingginya tingkat penyelewengan penggunaan dan desa yang menimbulkan kerugian negara	Sistem pengendalian internal dapat memperkuat pengaruh kompetensi, gaya kepemimpinan dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan desa
Fitrianingsi et al., (2023)	Effectiveness Of Regional Financial Management With The Regional Government Information System (SIPD) As The Intervening Variable RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences 0.18551/rjoas.2023-12.11	Penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif BPK masih menemukan kelemahan dan permasalahan dalam pengendalian internal laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2022 yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap aturan yang	Komptensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan anggaran. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan anggaran. Komunikasi

		timbul dari undang-undang	berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan anggaran Sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan anggaran Sistem informasi pemerintah daerah mampu memediasi pengaruh system pengawasan internal terhadap efektifitas pengelolaan anggaran
Andhayani & Eltivia, (2022)	The Effect of Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on Regional Financial Transparency in Local Governments Judicious 10.37010/jdc.v3i2.1162	Penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi alat parameter dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai transparansi dalam pelaporan anggaran	Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah
Josafat et al., (2024)	Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Dan Sistem Akuntansi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Emipiris Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah) Management Studies and Entrepreneurship Journal	Penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah masih memperoleh predikat B pada tahun 2021 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan	Sistem informasi pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Sistem akuntansi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

		system akuntabilitas dengan meningkatkan perbaikan.	Penerapan anggaran berbasis kinerja mampu memoderasi variabel Sistem informasi pengelolaan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah
Zulfikar & Aripin, n.d.(2023)	Influence of Competence and Application Local Government Information System (Sipd) Encouraging the Quality of Financial Management At the West Java Province Journal of Jabar Economic Society Networking Forum	Penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif Untuk mengikuti perubahan modernisasi yang ditandai dengan fenomena perkembangan teknologi serba digital, kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar dampaknya dapat dikelola dengan baik.	Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas manajemen keuangan. SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas manajemen keuangan
Kartika & Gorda, (2022)	Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah E-Jurnal Akuntansi 10.24843/eja.2022.v32.i01.p05	Penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif Terjadi penurunan publikasi dokumen BPKAD pada tahun 2019.	SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi anggaran di BPKAD Provinsi Bali SIPD mampu memediasi pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi anggaran di BPKAD Provinsi Bali

Temalagi et al., (2022)	The effect of accountability, transparency and internal control on value for money-based budget performance 3rd International Seminar on Accounting Society “The Review and Outlook of The Economy after Covid 19 Pandemic”	Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan bahwa kinerja pemerintah belum akuntabel dan transparan, serta pengendalian internal masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari kasus Bupati pertama yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan dana daerah sebesar Rp 42,5 miliar untuk kepentingan pribadi	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Nuha, (2022)	The Influence of Accountability and Transparency on Budget Management International Journal Accounting and Management Research	Badan Pengelolaan Anggaran Kabupaten Lumajang sering mengalami kegagalan karena dalam penyusunan strateginya masih belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah sering terjadi.	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Ilyas et al., (2024)	The Influence Of Accountability, Transparency And Supervision On Budget Performance At Higher Education Service Institutions Region XIII Aceh JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business Available	Terjadi fluktuasi pada realisasi nilai pengeluaran barang dan pengeluaran modal di LLDIKTI wilayah XIII Aceh	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran

Anggraini et al., (2021)	The Influence of Accountability, Transparency and Supervision on Budgeting Performance with the Concept of Value for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Journal of International Conference Proceedings	Masih banyaknya BUMDES yang belum mampu mengoptimalkan anggaran dengan kondisi aktual tidak mampu menghasilkan keuntungan usaha.	Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Arifani et al., (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value for Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura) Jurnal Akuntansi & Anggaran	Tidak terdapatnya laporan akuntabilitas pada tiap tahunnya mengindikasikan terjadinya penyelewangan dana.	Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Laoli, V., (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias RISET & JURNAL AKUNTANSI	Kewajiban penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Ratih & Ratnawati, (2023)	The Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Value for Money based Budget Performance in Mojokerto City IJEED (International Journal	Pencapaian tata kelola yang baik tidak dapat dipisahkan dari pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.	Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi

	of Entrepreneurship and Business Development)		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Saraswati & Suhartini, (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Ekonomis: Journal of Economics and Business	Terjadi ketidakstabilan presentase dalam laporan realisasi anggaran. Rendahnya realisasi anggaran pada bagian-bagian tertentu, menunjukkan ada beberapa program belum optimal dalam proses perencanaan, implementasi dan pelaporan yang terjadi pada penerapan anggaran.	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Batubara & Risna, (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)	Kinerja Pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam pengelolaan dana publik. Pada tahun 2016 mantan Bupati Bengkalis periode 2010 - 2015 ditahan karena diduga ikut menikmati uang haram dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 272 miliar pada tahun anggaran 2012.	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Arifiyanto et al., (2021)	the Effect of Accountability, Transparency, Budget Participation on Managerial Performance With Budget Effectiveness As Intervening Variables At Jember University American Research Journal of Humanities Social Science	Kurangnya penyerapan anggaran terjadi di organisasi pemerintah di Indonesia. Masalah ini menyebabkan penggunaan anggaran di instansi pemerintah menjadi tidak efektif. Di tingkat perguruan tinggi, penyerapan anggaran yang terjadi	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas keuangan namun tidak berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Transparansi berpengaruh

		di Universitas Jember masih relatif rendah, hal ini terlihat dari persentase penyerapan anggaran per kuartal pada tahun anggaran 2018 dan 2019.	signifikan terhadap efektifitas keuangan dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen.
Defitri, (2022)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidak sesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran (SIKPD) oleh aparat pemerintah.	Efektifitas penerapan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Nurazizza & Sudrajat, (2023)	Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Badan Anggaran Kabupaten Ngawi Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi	keterbatasan kinerja keuangan, sehingga perlu adanya komitmen sebagai reminder kepada pimpinan daerah akan perlunya tindak lanjut hasil audit untuk digunakan dalam mewujudkan perubahan pengelolaan anggaran	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
Irwansyah, (2023)	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Kinerja Pengelola Keuangan dan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi	SIMDA yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Provinsi Bengkulu sering terjadi kerusakan dan selalu diperbaharui (update) tipenya, sedangkan operator SIMDA yang ada di OPD, sebagian besar merupakan staf keuangan yang baru, sehingga operator SIMDA yang ada disetiap OPD sering mengalami kesulitan	Pemanfaatan system informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah

		pada saat mengoperasikan SIMDA	
Novrianti, D., Rusdarti, R., & Cahyaningd yah, D. (2022)	Peran Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Unit Kerja Universitas Negeri Semarang. Business and Economic Analysis Journal	Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Republik Indonesia atau BPKP RI mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban mempertanggungjawa bkan, menjawab dan menerangkan terkait kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Pemanfaatan system informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
Hayyin Rizki Utami, Tantina Haryati (2023)	Budgetary Goal Characteristics, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi Jambura Economic Education Journal	Keterbatasan kinerja keuangan, sehingga perlu adanya komitmen sebagai reminder kepada pimpinan daerah akan perlunya tindak lanjut hasil audit untuk digunakan dalam mewujudkan perubahan pengelolaan anggaran	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran

Afrianto, D., Sunardi, S., & Sisharini, N. (2024).	Pengaruh Perencanaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Melalui Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)	Berdasarkan data APBD tahun 2021, 2022, dan 2023, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menghadapi permasalahan dalam pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target, terutama dalam pengelolaan pendapatan yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara itu, sisi belanja mengalami peningkatan penyerapan pada tahun 2022 dan 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021.	Hasil pengujian MRA membuktikan bahwa ketiga variabel independen, yaitu perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah di Kabupaten Ponorogo. Secara parsial, perencanaan dan transparansi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran, sedangkan akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017).

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan konsep psikologi organisasi, akuntabilitas merupakan tanggung jawab individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang ditetapkan, yang terbentuk melalui pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan yang diambil (Ariely, 2020). Menurut teori pengelolaan sumber daya, akuntabilitas berkembang melalui mekanisme evaluasi terhadap kinerja dan responsibilitas, yang secara signifikan mempengaruhi cara individu atau kelompok berperilaku dan mengambil keputusan dalam konteks organisasi, termasuk dalam pengelolaan anggaran (Saputra et al., 2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Studi Arumugam et al. (2021) mengungkapkan bahwa individu atau tim dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi cenderung memiliki pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif, sedangkan penelitian Nasution et al. (2022) secara spesifik membuktikan adanya hubungan signifikan antara akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran dalam organisasi. Lebih lanjut, Sugiarto et al. (2020) menemukan bahwa strategi pengelolaan yang didasarkan pada akuntabilitas memiliki dampak langsung terhadap kinerja pengelolaan anggaran, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik pula kualitas pengelolaan anggaran yang dicapai.

2.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Transparansi didefinisikan sebagai sejauh mana informasi yang relevan, jelas, dan dapat diakses oleh publik mengenai proses pengelolaan anggaran, yang

memungkinkan partisipasi dan pengawasan yang lebih baik (Yanto dan Aqfir, 2020). Teori transparansi menjelaskan bahwa transparansi tercipta melalui pengungkapan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, di mana individu atau organisasi cenderung lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil jika ada pengawasan yang jelas dan terstruktur (Martinez & Lopez, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Studi Fultz et al. (2024) menemukan bahwa semakin tinggi transparansi dalam pengelolaan anggaran, semakin efektif penggunaan sumber daya yang ada, dengan pihak yang terlibat cenderung lebih efisien, akurat, dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Penelitian Aditya dan Lismawati (2021) lebih lanjut mengonfirmasi bahwa transparansi berkorelasi positif dengan kinerja pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks organisasi pemerintah, di mana keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas anggaran yang digunakan.

2.3.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dengan Dimoderasi Varibel Efektivitas SiPD

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan padanya kepada publik dan pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengelolaan anggaran, akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan dana, yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada kinerja pengelolaan anggaran. Teori yang relevan untuk mendukung hal ini adalah teori

akuntabilitas yang dikemukakan oleh Roberts (2001), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan anggaran, sehingga kinerja organisasi akan lebih baik.

Sistem Informasi Pengelolaan Dana (SiPD) dapat berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran. SiPD yang efektif dapat memfasilitasi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi anggaran secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sari dan Hamid (2019), menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang baik dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan memperbaiki akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian lain oleh Amalia (2020) juga menemukan bahwa efektivitas SiPD dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran, karena sistem tersebut memungkinkan pelaporan yang lebih efisien dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Dengan demikian, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran dapat lebih maksimal apabila dimoderasi oleh efektivitas SiPD, karena sistem informasi yang baik akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.

2.3.4 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dengan Dimoderasi Varibel Efektivitas SiPD

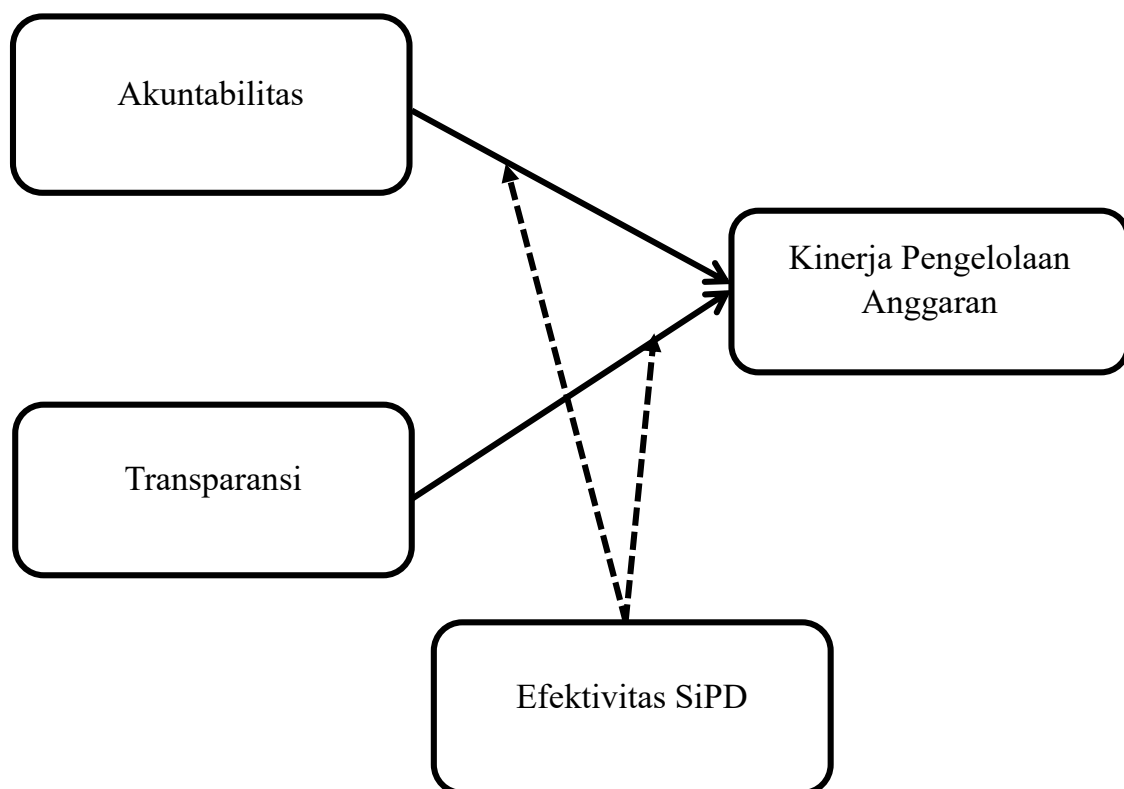
Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran itu sendiri. Transparansi

mengacu pada sejauh mana informasi terkait anggaran disampaikan kepada publik dengan jelas, terbuka, dan akurat. Menurut teori Principal-Agent, transparansi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Bastaman et al. (2017), menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Namun, pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran dapat dimoderasi oleh efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Data (SiPD). SiPD yang efektif dapat berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi proses transparansi dengan menyediakan platform yang tepat untuk menyampaikan informasi anggaran kepada semua pihak yang berkepentingan secara real-time. Sebuah penelitian oleh Fisher et al. (2018) menunjukkan bahwa efektivitas SiPD meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi anggaran yang disampaikan, yang pada gilirannya memperkuat dampak positif transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Dengan kata lain, meskipun transparansi penting, efektivitas SiPD berperan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara transparansi dan kinerja pengelolaan anggaran, tergantung pada seberapa baik sistem tersebut berfungsi.

Secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti dijelaskan dalam kerangka pemikiran. Kerangka berpikir penelitian dipaparkan dalam Gambar 2.1.

Kerangka ini berfungsi untuk memberikan gambaran alur logis dari keterkaitan antar variabel, mulai dari variabel independen hingga variabel dependen, sehingga memudahkan dalam memahami arah serta tujuan penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan atau pernyataan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji melalui penelitian. Menurut Sugiyono (2018), hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan

penelitian yang disusun berdasarkan teori dan konsep yang ada. Dalam hal ini, hipotesis berfungsi sebagai rencana atau asumsi yang akan diuji untuk mengetahui kebenarannya atau kesesuaiannya dengan kenyataan di lapangan.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan
2. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan
3. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja pengelolaan anggaran badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan dengan dimoderasi efektivitas SiPD
4. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja pengelolaan anggaran badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan dengan dimoderasi efektivitas SiPD

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*Explanation Research*) menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kuantitatif menurut Irfan et al., (2024) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), serta untuk melihat bagaimana variabel moderasi (Z) mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik. Pada studi ini variabel independen yang digunakan berupa Akuntabilitas dan Transparansi. Variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Anggaran pada lembaga pemerintah daerah. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), definisi operasional pada masing-masing variabel disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi variabel	Dimensi	Skala Pengukuran
Kinerja Pengelolaan Anggaran	Tingkat pencapaian pada sektor anggaran, termasuk perolehan pendapatan dan pengeluaran sesuai indikator yang ditetapkan dan aturan perundang-undangan (Sipahutar et al., 2024)	1. Kemandirian anggaran 2. Efektifitas anggaran 3. Efisiensi anggaran 4. Pertumbuhan pendapatan (Harun et al., 2021)	Ordinal
Akuntabilitas	Bentuk pertanggung jawaban organisasi atas kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk pelaporan informasi yang jelas dan akurat kepada pihak yang berkepentingan (Nurazizza & Sudrajat, 2023)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan (Harnovinsah et al., 2020)	Ordinal
Transparansi	Keterbukaan publik yang mencakup fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik dan proyeksi keuangan (Temalagi et al., 2022)	1. Keseuaian Informasi 2. Akses terhadap informasi 3. Peningkatan pengetahuan publik terhadap kegiatan pemerintahan 4. Peningkatan kepercayaan publik (Harnovinsah et al., 2020)	Ordinal
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Sistem teknologi informasi yang berfungsi untuk mendukung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah (Josafat et al., 2024)	1. Keamanan data 2. Kecepatan dan Ketepatan waktu 3. Ketelitian 4. Variasi Laporan 5. Relevansi Sistem (Defitri, 2022)	Ordinal

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Bappelitbang Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.21 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan,

Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025 hingga bulan Juni 2025, rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Feb				Maret				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																				
2	Studi Awal																				
3	Pengajuan Judul																				
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
5	Pelaksanaan Penelitian																				
6	Analisa Data																				
7	Penulisan Laporan Akhir																				
8	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini berupa Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada pengelolaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 100 pegawai.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Teknik sampling digunakan pada penelitian ini adalah teknik Accidental sampling. Dimana dalam pengambilan sampel peneliti tidak menetapkan ciri-ciri khusus. Sampel penelitian pada penelitian ini merupakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik sampling yang menggunakan seluruh populasi sebagai

sampel penelitian (Arikunto, 2016). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 pegawai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, data dikumpulkan dengan cara kuesioner, yaitu dengan cara memberikan pernyataan kepada responden secara online. Selanjutnya responden akan memberikan tanggapan dari pernyataan yang akan diberikan. Pengambilan data pada kuesioner dilakukan menggunakan Skala ordinal dalam pengukurannya.

Tabel 3. 3 Skala Pengukuran

Jawaban Responden	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengujian untuk melihat kelayakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

3.6 Uji Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Dalam penentuan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor

total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid (Yusup, 2018).

Hasil analisis data melalui uji terbatas dari 30 sampel responden (t -tabel = 0,30) pada masing-masing variabel dikemukakan sebagai berikut.

Tabel 3.4. Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation	r -kritis	Keterangan
X1-1	0,786	0,3	Valid
X1-2	0,797	0,3	Valid
X1-3	0,713	0,3	Valid
X1-4	0,809	0,3	Valid
X1-5	0,781	0,3	Valid
X1-6	0,757	0,3	Valid
X1-7	0,798	0,3	Valid
X1-8	0,703	0,3	Valid
X1-9	0,718	0,3	Valid
X1-10	0,772	0,3	Valid
X1-11	0,734	0,3	Valid
X1-12	0,756	0,3	Valid

Hasil uji validitas variabel Akuntabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel tersebut telah memenuhi kriteria validitas berdasarkan nilai Corrected Item Total Correlation (CITC). Nilai CITC untuk setiap item berkisar antara 0,703 hingga 0,809, yang semuanya lebih besar dari nilai r -kritis sebesar 0,3. Berdasarkan aturan tersebut, nilai CITC yang lebih besar dari 0,3 menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan valid, karena memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan total skor konstruk yang diukur.

Tabel 3.5. Uji Validitas Variabel Transparansi

Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation	r-kritis	Keterangan
X2-1	0,798	0,3	Valid
X2-2	0,795	0,3	Valid
X2-3	0,765	0,3	Valid
X2-4	0,791	0,3	Valid
X2-5	0,754	0,3	Valid
X2-6	0,812	0,3	Valid
X2-7	0,823	0,3	Valid
X2-8	0,871	0,3	Valid
X2-9	0,776	0,3	Valid
X2-10	0,761	0,3	Valid
X2-11	0,769	0,3	Valid
X2-12	0,811	0,3	Valid

Hasil uji validitas untuk variabel Kompleksitas Tugas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel ini valid. Setiap nilai Corrected Item Total Correlation (CITC) untuk item pertanyaan berkisar antara 0,754 hingga 0,871, yang semuanya lebih besar dari nilai r-kritis sebesar 0,3. Ini berarti setiap item memiliki korelasi yang signifikan dengan total skor konstruk Kompleksitas Tugas yang diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa item-item tersebut valid dalam menggambarkan dimensi variabel transparansi.

Tabel 3.6. Uji Validitas Variabel Kinerja Pengelolaan Anggaran

Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation	r-kritis	Keterangan
Y-1	0,732	0,3	Valid
Y-2	0,765	0,3	Valid
Y-3	0,777	0,3	Valid
Y-4	0,864	0,3	Valid
Y-5	0,823	0,3	Valid
Y-6	0,763	0,3	Valid
Y-7	0,814	0,3	Valid
Y-8	0,784	0,3	Valid
Y-9	0,810	0,3	Valid
Y-10	0,785	0,3	Valid

Y-11	0,812	0,3	Valid
Y-12	0,749	0,3	Valid

Hasil uji validitas untuk variabel kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel ini valid. Setiap nilai Corrected Item Total Correlation (CITC) untuk item pertanyaan berkisar antara 0,732 hingga 0,864, yang semuanya lebih besar dari nilai r-kritis sebesar 0,3. Dengan demikian, setiap item memiliki korelasi yang signifikan dengan total skor konstruk kinerja pengelolaan anggaran, yang berarti item-item tersebut relevan dan dapat digunakan untuk mengukur variabel ini secara akurat.

Tabel 3.7. Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation	r-kritis	Keterangan
Z-1	0,732	0,3	Valid
Z-2	0,767	0,3	Valid
Z-3	0,745	0,3	Valid
Z-4	0,778	0,3	Valid
Z-5	0,798	0,3	Valid
Z-6	0,782	0,3	Valid
Z-7	0,809	0,3	Valid
Z-8	0,821	0,3	Valid
Z-9	0,818	0,3	Valid
Z-10	0,794	0,3	Valid
Z-11	0,812	0,3	Valid
Z-12	0,806	0,3	Valid

Hasil uji validitas untuk variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel ini valid. Setiap nilai Corrected Item Total Correlation (CITC) untuk item pertanyaan berkisar antara 0,732 hingga 0,818, yang semuanya lebih besar

dari nilai r -kritis sebesar 0,3. Ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki korelasi yang cukup kuat dengan total skor konstruk Etika Profesi, mengindikasikan bahwa item-item tersebut secara signifikan merefleksikan konstruk yang dimaksud.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Untuk melihat reliabilitas instrumen akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrumen, (Matondang, 2009). Menurut Sekaran (Budiastuti & Bandur, 2018) jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Berikut ini merupakan hasil prasurvei yang telah dilakukan terhadap 30 responden penelitian didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 3.8 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Akuntabilitas (X1)	0.792	0.776
Transparansi (X2)	0.771	0.745
Kinerja Pengelolaan Anggaran (X3)	0.743	0.761
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Z)	0.751	0.745

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang melibatkan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR) pada variabel-variabel dalam penelitian ini,

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0.792, Transparansi (X2) sebesar 0.771, Kinerja Pengelolaan Anggaran (X3) sebesar 0.743, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Z) sebesar 0.751. Seluruh nilai tersebut melebihi ambang batas minimum 0,7, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai. Nilai Composite Reliability untuk masing-masing variabel juga menunjukkan hasil yang baik, yakni 0.776 untuk Akuntabilitas (X1), 0.745 untuk Transparansi (X2), 0.761 untuk Kinerja Pengelolaan Anggaran (X3), dan 0.745 untuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Z). Semua nilai CR ini juga melampaui batas minimum 0,7, yang menandakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dapat secara konsisten merepresentasikan masing-masing konstruk yang diukur.

Dengan demikian, instrumen pengukuran dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel dan memiliki kualitas yang layak, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara akuntabilitas, transparansi, kinerja pengelolaan anggaran, dan pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah.

3.7 Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Menurut (Sholiha & Salamah, 2015), metode SEM merupakan metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan linier pada variabel pengamatan (indikator) dan variabel yang tidak dapat diukur (variabel laten). Sedangkan, PLS menurut

(Fernanda et al., 2022) merupakan metode alternatif dalam pemodelan SEM yang dapat digunakan untuk mengestimasi model dengan indikator yang bersifat reflektif dan normatif. PLS-SEM dapat digunakan untuk menganalisa data yang tidak memenuhi asumsi normalitas, atau data penelitian dengan jumlah sedikit. Terdapat beberapa keunggulan dari PLS-SEM menurut (Rahadi, 2023), diantaranya:

1. Dapat memodelkan banyak variabel dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi.
2. Dapat mengatasi masalah multikolinieritas pada dataset yang besar
3. Kekohan dalam menangani masukan yang tidak lengkap
4. Kemampuan untuk menghasilkan variabel laten secara langsung berbasis dengan *cross product* yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi
5. Dapat digunakan pada konstruk relative serta formatif
6. Sampel yang digunakan kecil
7. Data tidak harus berdistribusi normal
8. Data dengan skala yang berbeda dapat digunakan

3.7.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Langkah berikutnya setelah mengevaluasi model pengukuran adalah melakukan evaluasi terhadap inner model atau model struktural. Dalam metode PLS, evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai R^2 untuk konstruk dependen, serta menilai nilai koefisien jalur (path coefficients) atau t-values pada setiap jalur untuk menguji signifikansi hubungan antar konstruk dalam model. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi

variabel dependen, yaitu sejauh mana variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Menurut (Garson, 2016) nilai koefisien jalur (path coefficient) atau inner model menggambarkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Tingkat signifikansi ini dievaluasi melalui t-statistic. Dalam pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi (alpha) 5% dan kekuatan uji (power) sebesar 80%, nilai t-statistic yang diperlukan untuk hipotesis dua arah (two-tailed) harus lebih besar dari 1,96, sedangkan untuk hipotesis satu arah (one-tailed), nilai t-statistic harus lebih besar dari 1,64.

3.7.1.1 Validitas Konstruk

Validitas konstruk (construct validity) adalah sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen benar-benar mengukur konstruk atau konsep yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks penelitian, konstruk mengacu pada konsep atau variabel abstrak yang ingin dijelaskan atau diuji, seperti kepuasan, motivasi, atau kecerdasan. Validitas konstruk memastikan bahwa instrumen yang digunakan (misalnya kuesioner atau tes) benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, dan bukan hal lain yang tidak relevan.

3.7.1.2 Reabilitas

Reabilitas (reliability) dalam konteks model pengukuran, khususnya dalam outer model pada Structural Equation Modeling (SEM), merujuk pada sejauh mana indikator atau item dalam model pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Reabilitas mengukur sejauh mana varians yang terdapat dalam indikator tersebut mencerminkan konstruk yang diukur, tanpa dipengaruhi oleh faktor luar

yang dapat menyebabkan ketidakstabilan hasil. Reliabilitas dapat diukur dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa instrumen pengukuran dapat diandalkan.

3.7.1.3 Outer Loading

Outer loadings merujuk pada korelasi antara indikator dan konstruk. Nilai loading yang lebih tinggi menunjukkan seberapa kuat indikator mengukur konstruk tersebut. Nilai yang direkomendasikan untuk outer loadings biasanya lebih besar dari 0,7.

3.7.2 Model Struktural (*Inner Model*)

3.7.2.1 Koefisien determinasi (R^2)

Nilai R^2 dalam SEM menggunakan PLS memiliki interpretasi yang serupa dengan regresi linier, yaitu menunjukkan proporsi variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model. Kriteria batasan nilai R^2 mencakup tiga klasifikasi:

1. Substansial (baik), jika nilai R^2 sebesar 0,67 atau lebih.
2. Moderat, jika nilai R^2 berada di sekitar 0,33.
3. Lemah, jika nilai R^2 mendekati 0,19 atau kurang.

Klasifikasi ini membantu mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan hubungan antar variabel (Marliana, 2019).

3.7.2.2 Uji Signifikan (P-Values/t-Statistic)

Uji signifikansi dilakukan untuk menguji apakah hubungan antara variabel dalam model memiliki signifikansi statistik dengan menghitung t-statistik dan p-

value. T-statistik mengukur seberapa besar pengaruh suatu hubungan antara dua variabel dibandingkan dengan error standar, sehingga nilai t yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat. P-value menunjukkan sejauh mana hubungan tersebut signifikan, di mana p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan pada tingkat 5%. Secara umum, suatu hubungan dianggap signifikan jika $p\text{-value} < 0,05$ atau $t\text{-statistik} > 1,96$, yang mengindikasikan bahwa hubungan tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran publik. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, BAPPELITBANG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara akuntabel dan transparan. Dalam menjalankan fungsinya, BAPPELITBANG tidak hanya berperan sebagai penyusun kebijakan perencanaan, tetapi juga sebagai pengendali dan evaluator terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi elemen penting yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Tingkat akuntabilitas mencerminkan sejauh mana penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sementara transparansi menunjukkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya anggaran.

Dalam konteks digitalisasi pemerintahan, efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu faktor yang memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran. SIPD berfungsi sebagai alat bantu utama dalam pencatatan, pelaporan, dan

pengawasan anggaran secara real-time. Penggunaan SIPD yang efektif diyakini dapat meningkatkan kecepatan akses informasi, akurasi data, serta koordinasi antar unit kerja, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola anggaran. BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari rentang usia, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan terakhir. Secara detail, karakteristik responden penelitian dirangkum dalam Tabel 4.1 berikut. Dari 100 kuesioner yang disebar, sebanyak 100 kuesioner berhasil dikembalikan dan digunakan dalam analisis.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Rentang Usia (Tahun)		
< 20	-	-
21 – 30	23	23%
31 – 40	27	27%
41 – 50	30	30%
> 50	20	20%
Total	100	100%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	67	67%
Perempuan	33	33%
Total	100	100%
Pendidikan		
SMA	11	11%
S1	53	53%
S2	22	22%
Lainnya	16	16%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, rentang usia responden didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun, yang mencakup 30 orang atau sebesar 30%, diikuti oleh

rentang usia 31–40 tahun sebanyak 27 orang (27%) dan rentang usia > 50 tahun sebanyak 20 orang (20%). Rentang usia yang paling sedikit adalah kelompok usia 21–30 tahun, dengan jumlah 23 orang atau sebesar 23%. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 67 orang atau sebesar 67%, sementara responden perempuan sebanyak 33 orang atau sebesar 33%. Selain itu, berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan S1 mendominasi sebanyak 53 orang (53%), diikuti dengan pendidikan S2 sebanyak 22 orang (22%), dan pendidikan lainnya sebanyak 16 orang (16%). Responden dengan pendidikan SMA adalah yang paling sedikit, yaitu 11 orang atau sebesar 11%. Kuesioner yang disebar sebanyak 100, seluruh kuesioner tersebut kembali dalam kondisi lengkap, sehingga 100 kuesioner digunakan dalam analisis ini.

4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

4.3.1 Akuntabilitas (X1)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Akuntabilitas disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Persentase Jawan Responden pada Akuntabilitas

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Auntabilitas hukum dan kejujuran									
1.	Pegawai di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	3	12	33	52	100	4.5	Sangat Baik

		0%	3%	12%	33%	52%			
2.	Praktik pengelolaan anggaran dilakukan secara jujur dan terbuka.	0	2	14	38	46	100	4.4	Sangat Baik
		0%	2%	14%	38%	46%			
3.	Setiap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.	0	4	15	34	47	100	4.5	Sangat Baik
		0%	4%	15%	34%	47%			
Akuntabilitas Proses									
4.	Proses perencanaan anggaran dilakukan secara partisipatif dan transparan.	0	3	13	37	47	100	4.6	Sangat Baik
		0%	3%	13%	37%	47%			
5.	Mekanisme kerja pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.	0	4	15	35	46	100	4.4	Sangat Baik
		0%	4%	15%	35%	46%			
6.	Proses evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.	0	3	14	31	52	100	4.5	Sangat Baik
		0%	3%	14%	31%	52%			
Akuntabilitas Program									
7.	Setiap program yang dilaksanakan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.	0	2	13	36	49	100	4.6	Sangat Baik
		0%	2%	13%	36%	49%			
8.	Pelaksanaan program diawasi untuk menjamin hasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan.	0	1	10	39	50	100	4.5	Sangat Baik

		0%	1%	10%	39%	50%			
9.	Hasil pelaksanaan program digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.	0	3	14	35	48	100	4.4	Sangat Baik
		0%	3%	14%	35%	48%			
Akuntabilitas Kebijakan									
10.	Kebijakan anggaran yang ditetapkan berorientasi pada kepentingan publik.	0	2	15	37	46	100	4.5	Sangat Baik
		0%	2%	15%	37%	46%			
11.	Penyusunan kebijakan anggaran mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.	0	3	14	36	47	100	4.6	Sangat Baik
		0%	3%	14%	36%	47%			
12.	Pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan kebijakan anggaran kepada masyarakat.	0	3	11	37	49	100	4.4	Sangat Baik
		0%	3%	11%	37%	49%			

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, secara umum masyarakat memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan. Hampir seluruh indikator memperoleh penilaian "Baik" dan "Sangat Baik", dengan total persentase keduanya melampaui angka 80% pada setiap aspek akuntabilitas yang dinilai.

Pada aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, responden menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas birokrasi. Sebanyak 52% responden menilai "Sangat Baik" terhadap kepatuhan pegawai terhadap peraturan

perundang-undangan, sementara 33% memberikan penilaian "Baik". Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang pelaksanaan tugas dilakukan secara legal dan profesional. Untuk praktik pengelolaan anggaran yang jujur dan terbuka, 46% responden memberikan penilaian "Sangat Baik" dan 38% menilai "Baik", mencerminkan kepercayaan terhadap transparansi dalam penggunaan dana publik. Meski demikian, terdapat 2% hingga 4% responden yang masih memberikan penilaian "Tidak Baik" atau "Kurang Baik", yang mungkin disebabkan oleh persepsi negatif terhadap pengalaman tertentu yang mereka alami atau dengar terkait potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Pada dimensi akuntabilitas proses, hasil survei menunjukkan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan prosedur dan transparansi kerja. Penilaian tertinggi diperoleh pada indikator perencanaan anggaran yang partisipatif dan transparan, dengan 47% responden menyatakan "Sangat Baik" dan 37% "Baik". Demikian pula, mekanisme kerja yang sesuai prosedur mendapat kombinasi positif 35% "Baik" dan 46% "Sangat Baik". Evaluasi yang dilakukan secara rutin juga dinilai sangat positif oleh masyarakat, dengan 52% menyatakan "Sangat Baik" dan 31% "Baik". Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 3-4% responden yang belum sepenuhnya puas, kemungkinan karena kurangnya informasi publik terkait evaluasi atau karena belum merasakan dampak langsung dari evaluasi yang dilakukan.

Penilaian terhadap akuntabilitas program menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 49% responden menyatakan "Sangat Baik" pada indikator kejelasan dan keterukuran indikator kinerja program, sementara 36% menilai "Baik". Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat percaya bahwa

program yang dijalankan memiliki tujuan yang jelas dan indikator evaluasi yang konkret. Untuk pelaksanaan program yang diawasi agar sesuai tujuan, 50% responden memberikan penilaian "Sangat Baik" dan 39% "Baik", menandakan persepsi bahwa sistem pengawasan berjalan efektif. Penggunaan hasil program sebagai dasar perbaikan kebijakan juga dinilai baik oleh publik, dengan 48% menyatakan "Sangat Baik" dan 35% "Baik".

Dalam aspek akuntabilitas kebijakan, mayoritas responden menyatakan bahwa kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah telah berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini tercermin dari 46% responden yang memberikan penilaian "Sangat Baik" terhadap orientasi kebijakan pada kebutuhan masyarakat, dan 37% yang menilai "Baik". Selain itu, dalam hal penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan, sebanyak 47% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", menandakan bahwa partisipasi publik sudah relatif baik dan mekanisme konsultasi publik mulai berjalan secara efektif. Dalam hal pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat, 49% responden menyatakan "Sangat Baik", menunjukkan bahwa upaya keterbukaan dan transparansi telah mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa tingkat akuntabilitas kebijakan di lingkungan pemerintah daerah sudah menunjukkan arah yang positif, meskipun tetap diperlukan peningkatan dalam konsistensi penerapan prinsip transparansi dan pelibatan masyarakat secara lebih menyeluruh dalam setiap tahap proses kebijakan.

4.3.2 Transparansi (X2)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Transparansi disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Persentase Jawan Responden pada Transparansi

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Kesesuaian Informasi									
1.	Informasi yang disampaikan oleh Bappelitbang terkait anggaran sesuai dengan kondisi sebenarnya.	0	4	11	35	50	100	4.5	Sangat Baik
		0%	4%	11%	35%	50%			
2.	Laporan kegiatan dan penggunaan anggaran disusun secara jelas dan mudah dipahami.	0	3	13	40	44	100	4.4	Sangat Baik
		0%	3%	13%	40%	44%			
3.	Informasi keuangan yang disampaikan telah mencakup seluruh komponen penting yang dibutuhkan publik.	0	2	14	35	49	100	4.5	Sangat Baik
		0%	2%	14%	35%	49%			
Akses Terhadap Informasi									
4.	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran.	0	4	13	37	48	100	4.6	Sangat Baik
		0%	4%	13%	37%	48%			
5.	Pemerintah daerah menyediakan platform yang memfasilitasi keterbukaan informasi anggaran.	0	2	16	35	47	100	4.4	Sangat Baik
		0%	2%	16%	35%	47%			

6.	Informasi kegiatan dan anggaran tersedia secara daring (online) dan dapat diakses kapan saja.	0	4	15	32	49	100	4.5	Sangat Baik
		0%	4%	15%	32%	49%			
Peningkatan Pengetahuan Publik Terhadap Kegiatan Pemerintahan									
7.	Informasi yang disampaikan pemerintah membantu masyarakat memahami proses perencanaan pembangunan.	0	3	12	35	50	100	4.6	Sangat Baik
		0%	3%	12%	35%	50%			
8.	Transparansi informasi telah mendorong partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.	0	2	11	38	49	100	4.5	Sangat Baik
		0%	2%	11%	38%	49%			
9.	Sosialisasi kegiatan dan anggaran dilakukan secara berkala kepada masyarakat.	0	4	13	34	49	100	4.4	Sangat Baik
		0%	4%	13%	34%	49%			
Peningkatan Kepercayaan Publik									
10.	Sosialisasi kegiatan dan anggaran dilakukan secara berkala kepada masyarakat.	0	3	14	36	47	100	4.5	Sangat Baik
		0%	3%	14%	36%	47%			
11.	Masyarakat merasa yakin bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.	0	2	15	34	49	100	4.6	Sangat Baik
		0%	2%	15%	34%	49%			
12.	Keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih percaya terhadap program-program pemerintah.	0	2	12	41	45	100	4.4	Sangat Baik
		0%	2%	12%	41%	45%			

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden mengenai transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, secara umum masyarakat memberikan penilaian yang sangat baik terhadap keterbukaan informasi pemerintah daerah. Pada setiap indikator, lebih dari 80% responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik", yang mengindikasikan adanya kepercayaan publik terhadap upaya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada aspek kesesuaian informasi, mayoritas responden merasa bahwa informasi yang diberikan oleh Bappelitbang sudah sesuai dengan kenyataan dan mudah dipahami. Sebanyak 50% responden menilai "Sangat Baik" terhadap kesesuaian informasi anggaran dengan kondisi sebenarnya, serta 35% menilai "Baik", yang mencerminkan kepercayaan bahwa laporan anggaran disusun berdasarkan data yang valid. Untuk kejelasan penyusunan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran, 44% responden memberikan penilaian "Sangat Baik" dan 40% "Baik", yang menunjukkan bahwa format dan bahasa laporan cukup dipahami oleh publik. Informasi keuangan yang mencakup seluruh komponen penting juga memperoleh penilaian positif, dengan 49% responden menilai "Sangat Baik", menandakan bahwa masyarakat merasa kebutuhan informasi mereka telah terpenuhi dengan baik.

Dalam hal akses informasi, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat relatif mudah mendapatkan informasi anggaran. Sebanyak 48% responden menyatakan "Sangat Baik" terhadap kemudahan akses informasi anggaran, dan 37% menyatakan "Baik". Ini menunjukkan adanya saluran komunikasi yang cukup

terbuka dan dapat diakses oleh publik. Penyediaan platform keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah juga mendapat apresiasi, dengan 47% responden menilai "Sangat Baik", dan 35% "Baik". Informasi daring atau online juga dinilai cukup tersedia, dengan 49% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", menandakan bahwa digitalisasi informasi telah berjalan dengan baik. Namun, sekitar 4% responden masih menilai "Tidak Baik", yang menunjukkan bahwa akses terhadap informasi online masih perlu ditingkatkan dari sisi kecepatan, kemudahan navigasi, atau jangkauan jaringan.

Transparansi informasi terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai proses pembangunan. Sebanyak 50% responden menilai "Sangat Baik" terhadap peran informasi dalam membantu mereka memahami proses perencanaan pembangunan, dan 35% menilai "Baik", mencerminkan efektivitas komunikasi publik. Transparansi informasi juga mendorong partisipasi publik, dengan 49% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", serta 38% "Baik". Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi turut memperkuat pengawasan publik terhadap anggaran. Sosialisasi kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala pun mendapat respon positif dari publik, dengan 49% menilai "Sangat Baik" dan 34% "Baik", meskipun masih ada 4% yang memberikan penilaian negatif, yang mungkin menunjukkan kurang meratanya kegiatan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Transparansi keuangan juga terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah. Pada indikator keyakinan masyarakat bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab, 49% responden

menyatakan "Sangat Baik", sementara 34% lainnya menilai "Baik". Untuk aspek keterbukaan informasi yang meningkatkan kepercayaan publik, sebanyak 45% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", yang menunjukkan efek langsung keterbukaan terhadap persepsi publik. Meskipun demikian, 2% hingga 3% responden memberikan penilaian "Tidak Baik", yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pengalaman langsung mereka terhadap implementasi kebijakan yang transparan atau karena kurangnya bukti nyata di lingkungan mereka.

4.3.3 Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Transparansi disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Persentase Jawan Responden pada Kinerja pengelolaan Anggaran

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Kemandrian Anggaran									
1.	Pemerintah daerah kami mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).	0	4	12	37	47	100	4.5	Sangat Baik
		0%	4%	12%	37%	47%			
2.	Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi. <i>(reverse statement)</i>	0	2	11	40	47	100	4.4	Sangat Baik
		0%	2%	11%	40%	47%			
3.	Pemerintah daerah memiliki strategi yang jelas untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.	0	4	11	37	48	100	4.5	Sangat Baik

10.	Pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru secara berkelanjutan.	0	5	13	35	47	100	4.5	Sangat Baik
		0%	5%	13%	35%	47%			
11.	Peningkatan pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan layanan publik.	0	2	15	37	46	100	4.6	Sangat Baik
		0%	2%	15%	37%	46%			
12.	Pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.	0	3	12	39	48	100	4.4	Sangat Baik
		0%	3%	12%	39%	48%			

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden mengenai kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, secara keseluruhan diperoleh penilaian yang sangat positif. Semua indikator memperoleh skor rata-rata di atas 4,4 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik", dengan persentase gabungan "Baik" dan "Sangat Baik" yang konsisten melampaui 80%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara mandiri, efisien, dan berdampak.

Dalam aspek kemandirian anggaran, masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan upaya nyata dalam membiayai pembangunan dari sumber internal. Sebanyak 47% responden memberikan penilaian "Sangat Baik" terhadap kemampuan pemerintah membiayai sebagian besar kegiatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 37% menilai "Baik", menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keberdayaan fiskal daerah. Meskipun terdapat pernyataan terbalik

mengenai ketergantungan terhadap dana pusat, 47% tetap memberikan penilaian "Sangat Baik", yang mencerminkan persepsi bahwa ketergantungan tersebut mulai menurun. Selain itu, 48% responden menilai "Sangat Baik" atas adanya strategi pemerintah dalam meningkatkan sumber PAD, memperkuat keyakinan bahwa pemerintah memiliki arah yang jelas dalam memperluas basis pendapatan.

Penilaian terhadap efektivitas anggaran juga menunjukkan hasil menggembirakan. Sebanyak 52% responden menyatakan "Sangat Baik" bahwa alokasi anggaran telah sesuai kebutuhan pembangunan, dengan 35% menilai "Baik", mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Program dan kegiatan APBD dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh 51% responden yang menilai "Sangat Baik", dan 34% menilai "Baik". Realisasi belanja yang sesuai dengan rencana juga dinilai sangat positif (48% "Sangat Baik", 35% "Baik"), yang memperkuat persepsi bahwa implementasi anggaran dilakukan secara disiplin dan terukur.

Pada aspek efisiensi, hasil survei menunjukkan bahwa prinsip penghematan telah diterapkan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh 47% responden yang memberikan penilaian "Sangat Baik", dan 37% "Baik", menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara cermat dan bertanggung jawab. Sebanyak 46% responden menyatakan "Sangat Baik" terhadap ketersediaan analisis biaya-manfaat pada setiap kegiatan yang dibiayai APBD, sementara 36% menilai "Baik", yang menunjukkan adanya evaluasi ekonomi sebelum pelaksanaan program. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai rencana juga dinilai baik (45%

"Sangat Baik", 37% "Baik"), meskipun masih terdapat 5% responden yang menilai "Tidak Baik", yang bisa jadi karena keterlambatan kegiatan tertentu di lapangan.

4.3.4 Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Y)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Transparansi disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Persentase Jawan Responden pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Keamanan Data									
1.	Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) memiliki fitur keamanan yang dapat mencegah akses ilegal.	0	2	11	43	44	100	4.4	Sangat Baik
		0%	2%	11%	43%	44%			
2.	Data anggaran dan perencanaan pembangunan tersimpan dengan aman dalam sistem.	0	2	11	42	45	100	4.5	Sangat Baik
		0%	2%	11%	42%	45%			
Kecepatan dan Ketepatan Waktu									
3.	SIPD memudahkan pegawai untuk mengakses data secara cepat saat dibutuhkan.	0	3	13	39	45	100	4.6	Sangat Baik
		0%	3%	13%	39%	45%			
4.	Proses input dan pemrosesan data dalam sistem dilakukan secara efisien dan tepat waktu.	0	1	10	39	50	100	4.5	Sangat Baik
		0%	1%	10%	39%	50%			

Ketelitian									
5.	SIPD dapat meminimalisir kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan data anggaran.	0	1	13	37	49	100	4.4	Sangat Baik
		0%	1%	13%	37%	49%			
6.	Hasil laporan yang dihasilkan dari sistem dapat diandalkan untuk keperluan audit dan evaluasi.	0	2	10	39	49	100	4.6	Sangat Baik
		0%	2%	10%	39%	49%			
Variasi Laporan									
7.	SIPD mampu menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan dan kinerja sesuai kebutuhan.	0	3	12	40	45	100	4.4	Sangat Baik
		0%	3%	12%	40%	45%			
8.	Laporan yang dihasilkan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari berbagai unit kerja.	0	4	14	38	44	100	4.5	Sangat Baik
		0%	4%	14%	38%	44%			
Relevansi Sistem									
9.	Fungsi dalam sistem SIPD selaras dengan kebutuhan manajemen anggaran dan perencanaan pembangunan.	0	5	13	36	46	100	4.4	Sangat Baik
		0%	5%	13%	36%	46%			
10.	Informasi yang disediakan oleh sistem relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.	0	4	10	37	49	100	4.5	Sangat Baik
		0%	4%	10%	37%	49%			
11.	Sistem selalu diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi.	0	4	17	38	41	100	4.6	Sangat Baik

		0%	4%	17%	38%	41%			
12.	SIPD memudahkan koordinasi antar unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.	0	5	12	37	46	100	4.5	Sangat Baik
		0%	5%	12%	37%	46%			

Hasil survei terhadap 100 responden menunjukkan bahwa implementasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh indikator mendapatkan skor rata-rata antara 4.4 hingga 4.6, yang mengindikasikan kepuasan tinggi dari responden terhadap berbagai aspek dalam sistem, termasuk keamanan data, kecepatan akses, ketelitian, fleksibilitas pelaporan, dan relevansi sistem terhadap kebutuhan organisasi.

Dalam hal keamanan data, mayoritas responden merasa yakin bahwa SIPD memiliki sistem proteksi yang kuat terhadap akses ilegal. Sebanyak 44% responden menilai "Sangat Baik" atas fitur keamanan sistem, sementara 43% menilai "Baik", menunjukkan bahwa perlindungan data dianggap cukup andal. Selain itu, sebanyak 45% responden juga memberikan penilaian "Sangat Baik" terhadap keamanan penyimpanan data anggaran dan perencanaan pembangunan dalam sistem, yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap perlindungan arsip digital penting.

SIPD dinilai sangat memudahkan akses data secara cepat dan tepat waktu. Sebanyak 45% responden menyatakan "Sangat Baik" dan 39% menyatakan "Baik" terhadap kemudahan akses informasi oleh pegawai, mencerminkan efisiensi sistem dalam mendukung kebutuhan operasional. Selain itu, proses input dan pemrosesan

data juga dinilai positif dengan 50% responden menilai "Sangat Baik", yang menandakan keandalan sistem dalam pengelolaan data secara real-time dan terstruktur.

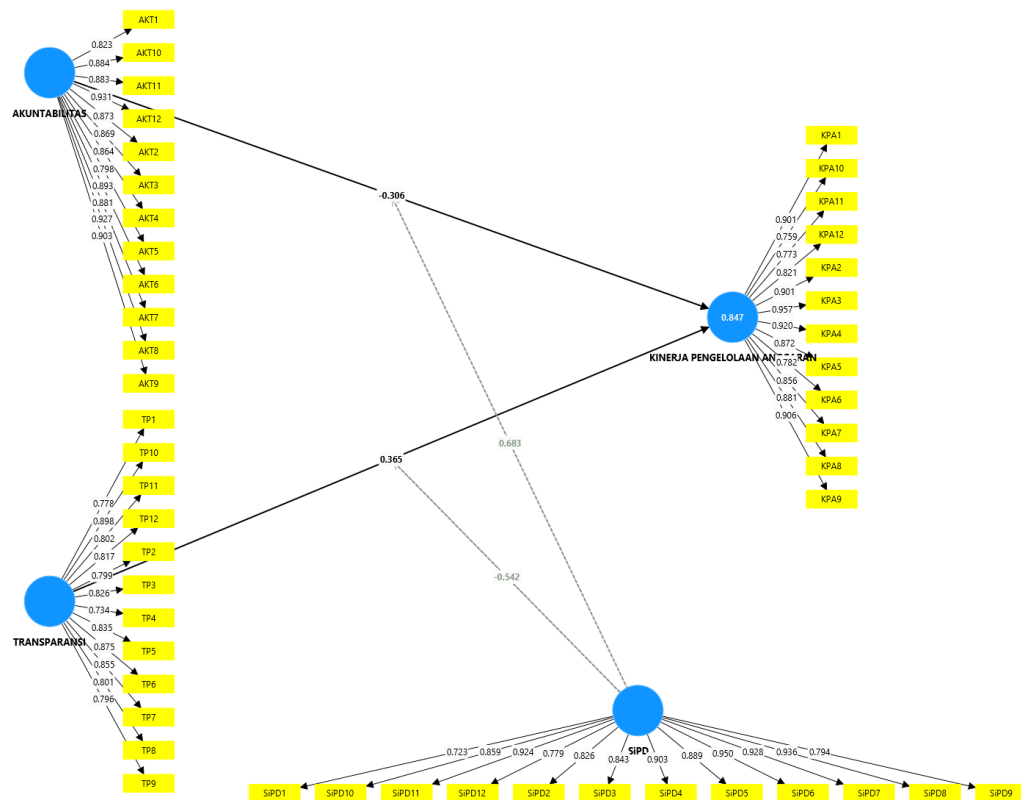
Pada aspek ketelitian, SIPD dianggap efektif dalam meminimalisir kesalahan manusia dalam pengelolaan anggaran. Sebanyak 49% responden menilai "Sangat Baik", dan 37% menilai "Baik", yang menunjukkan sistem dapat mengurangi risiko human error. Hasil laporan dari sistem juga dipercaya untuk mendukung audit dan evaluasi, dibuktikan dengan 49% responden yang memberikan penilaian "Sangat Baik", dan 39% menilai "Baik". Sistem juga dinilai fleksibel dalam menghasilkan berbagai laporan keuangan dan kinerja yang dibutuhkan. 45% responden menilai "Sangat Baik" terhadap kemampuan SIPD dalam menghasilkan jenis laporan yang beragam, dan 40% menilai "Baik". Kemampuan sistem dalam menyajikan laporan yang dapat disesuaikan antar unit kerja juga diapresiasi, dengan 44% penilaian "Sangat Baik", dan 38% "Baik", mencerminkan adaptabilitas sistem terhadap kebutuhan spesifik pengguna.

SIPD dinilai memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan manajemen anggaran dan pengambilan keputusan strategis. Sebanyak 46% responden menyatakan "Sangat Baik" terhadap keselarasan fungsi sistem dengan kebutuhan perencanaan dan anggaran, serta 49% menilai "Sangat Baik" atas informasi strategis yang disediakan. Adapun pembaruan sistem secara berkala sesuai regulasi juga mendapat apresiasi, dengan 41% responden menilai "Sangat Baik" dan 38% "Baik", menunjukkan bahwa responden merasakan sistem terus mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi. Terakhir, kemudahan koordinasi antar unit kerja melalui SIPD

juga dinilai positif, dengan 46% responden menilai "Sangat Baik", mencerminkan peran penting SIPD dalam memperlancar siklus perencanaan dan pelaporan.

4.4 Hasil Analisis SEM

Analisis Structural Equation Modeling (SEM) dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan tujuan serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS), dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. PLS sendiri merupakan pendekatan dalam SEM yang cocok diterapkan pada data multivariat dengan jumlah sampel yang tergolong kecil (sekitar 30–100 responden) serta tidak mensyaratkan asumsi distribusi parametrik (Yamin & Kurniawan, 2009). Pelaksanaan analisis SEM-PLS dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi terhadap model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Diagram hubungan antar variabel dalam model SEM yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Outer Loading

Gambar 4.1 adalah output dari perangkat lunak SmartPLS, yang digunakan untuk menganalisis model struktural berbasis Partial Least Squares (PLS). Berdasarkan judul penelitian, yaitu "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dengan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi," output tersebut menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji. Di sisi kiri, terdapat dua variabel independen utama, yaitu Akuntabilitas dan Transparansi, yang masing-masing memiliki indikator-indikator yang menggambarkan pengukuran dari variabel tersebut. Di bagian tengah, Kinerja Pengelolaan Anggaran menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, dengan indikator-indikator yang terhubung untuk mengukur

kinerjanya. Di bagian kanan bawah, terdapat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai variabel moderasi, yang diharapkan dapat mempengaruhi hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran. Indikator yang terhubung dengan SIPD menggambarkan bagaimana efektivitas SIPD diukur dalam konteks penelitian ini. Garis-garis yang menghubungkan Akuntabilitas dan Transparansi dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran menunjukkan pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, sementara garis yang menghubungkan SIPD dengan variabel lainnya menunjukkan peran moderasi SIPD. Dengan demikian, diagram ini menggambarkan model yang menguji seberapa besar pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran, serta bagaimana SIPD dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

4.4.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis model pengukuran bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen dengan menetapkan hubungan antara variabel laten dan indikator-indikator yang mengukurnya (variabel manifest atau observed). Evaluasi terhadap model pengukuran (*outer model*) dalam pendekatan SEM pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, pengujian validitas instrumen, yang mencakup validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Kedua, pengujian reliabilitas instrumen, yang dilakukan dengan mengukur reliabilitas melalui nilai *cronbach's alpha* serta reliabilitas komposit (*composite reliability*). Uraian berikut menyajikan penjelasan mendetail mengenai kedua tahapan tersebut dalam konteks analisis outer model penelitian ini.

4.4.1.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan yang mewakili variabel laten dapat dipahami oleh responden sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh peneliti. Dengan kata lain, validitas ini digunakan untuk menilai sejauh mana indikator (variabel manifest) berkorelasi secara signifikan dengan konstruk atau variabel laten yang diukurnya. Menurut Latan (2015), terdapat dua kriteria umum dalam menilai validitas konvergen pada indikator reflektif. Pertama, nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat konfirmatori. Kedua, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus melebihi 0,5 sebagaimana disarankan oleh Hair et al. (2017).

1. *Loading Factor*

Loading Factor merupakan nilai atau angka yang menunjukkan hubungan antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator yang mengukur suatu konstruk/laten. Hasil loading factor dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6. Nilai Loading Factor

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
Akuntabilitas (X1)	P1	0,810
	P2	0,752
	P3	0,796
	P4	0,821
	P5	0,754
	P6	0,785
	P7	0,798
	P8	0,807
	P9	0,721
	P10	0,808
	P11	0,714
	P12	0,743
Transparansi (X2)	P1	0,790
	P2	0,785
	P3	0,821

	P4	0,737
	P5	0,757
	P6	0,782
	P7	0,753
	P8	0,832
	P9	0,798
	P10	0,741
	P11	0,831
	P12	0,793
SIPD (Z)	P1	0,712
	P2	0,847
	P3	0,725
	P4	0,731
	P5	0,787
	P6	0,751
	P7	0,804
	P8	0,777
	P9	0,803
	P10	0,798
	P11	0,722
	P12	0,837
Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	P1	0,825
	P2	0,782
	P3	0,820
	P4	0,788
	P5	0,857
	P6	0,737
	P7	0,856
	P8	0,714
	P9	0,749
	P10	0,873
	P11	0,819
	P12	0,736

Tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai outer loading/loading factor pada seluruh variabel manifest (indikator) dalam model PLS. Hasil menunjukkan jika nilai loading factor pada seluruh indikator variabel konstruk/laten $> 0,7$. Sehingga tidak ada indikator pada konstruk variabel laten yang dieliminasi dari model.

2. *Average Variance Extracted (AVE)*

Pengujian nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat bukti validitas konvergen dalam model yang dibangun, atau dapat pula dijadikan alternatif dalam menguji validitas konvergen. Suatu model dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen apabila nilai AVE yang dihasilkan melebihi 0,5 (Kock & Lyns, 2012). Nilai-nilai AVE dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis menggunakan PLS dan dirangkum dalam Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7. Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
SIPD (Z)	0,601	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,621	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Akuntabilitas (X1)	0,651	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Transparansi (X2)	0,611	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing variabel laten $> 0,50$. Sehingga dapat disimpulkan jika data pada model yang dikonstruksi tidak memiliki permasalahan validitas secara konvergen.

4.4.1.2 Validitas Diskriminan

Validitas Diskriminan merujuk pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat membedakan antara dua atau lebih konsep yang berbeda. Dalam konteks penelitian kuantitatif, validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk atau variabel yang diukur benar-benar berbeda dari konstruk

atau variabel lainnya. Artinya, suatu alat ukur harus dapat mengukur konsep yang dimaksud tanpa tercampur dengan konsep lain yang tidak relevan.

Tabel 4.8 Nilai *Cross Loading*

	AKT	TP	AKP	SiPD
X1.1	0.964	0.734	0.729	0.737
X1.2	0.825	0.675	0.678	0.671
X1.3	0.901	0.715	0.718	0.721
X1.4	0.845	0.742	0.737	0.742
X1.5	0.945	0.782	0.779	0.775
X1.6	0.965	0.632	0.635	0.628
X1.7	0.947	0.654	0.659	0.662
X1.8	0.839	0.751	0.747	0.752
X1.9	0.898	0.699	0.703	0.697
X1.10	0.802	0.652	0.649	0.646
X1.11	0.872	0.611	0.628	0.638
X1.12	0.899	0.647	0.673	0.649
X2.1	0.737	0.962	0.731	0.724
X2.2	0.673	0.818	0.652	0.682
X2.3	0.723	0.905	0.747	0.775
X2.4	0.745	0.845	0.725	0.741
X2.5	0.778	0.952	0.777	0.752
X2.6	0.631	0.967	0.687	0.617
X2.7	0.661	0.943	0.647	0.658
X2.8	0.754	0.835	0.652	0.727
X2.9	0.699	0.892	0.717	0.673
X2.10	0.644	0.806	0.648	0.654
X2.11	0.654	0.879	0.658	0.686
X2.12	0.673	0.913	0.682	0.674
Y.1	0.715	0.747	0.934	0.712
Y.2	0.719	0.702	0.973	0.722
Y.3	0.726	0.712	0.984	0.723
Y.4	0.647	0.672	0.863	0.654
Y.5	0.632	0.647	0.849	0.634
Y.6	0.651	0.614	0.799	0.648
Y.7	0.694	0.671	0.857	0.691
Y.8	0.705	0.717	0.796	0.708

Y.9	0.719	0.787	0.927	0.722
Y.10	0.735	0.741	0.918	0.731
Y.11	0.712	0.698	0.921	0.717
Y.12	0.682	0.652	0.943	0.654
Z.1	0.72	0.775	0.727	0.931
Z.2	0.674	0.625	0.682	0.878
Z.3	0.752	0.736	0.747	0.921
Z.4	0.731	0.691	0.741	0.879
Z.5	0.752	0.713	0.781	0.924
Z.6	0.691	0.712	0.638	0.934
Z.7	0.654	0.663	0.679	0.925
Z.8	0.657	0.742	0.754	0.917
Z.9	0.707	0.725	0.68	0.921
Z.10	0.652	0.689	0.651	0.881
Z.11	0.719	0.715	0.736	0.949
Z.12	0.727	0.719	0.775	0.982

4.4.1.3 Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha adalah ukuran reliabilitas yang sering digunakan untuk menilai konsistensi internal item-item yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk. Nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana item dalam suatu konstruk saling berkorelasi satu sama lain, dengan rentang nilai 0,7 atau lebih dianggap sebagai reliabilitas yang baik. Nilai antara 0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima, namun nilai di bawah 0,6 menunjukkan bahwa instrumen tidak reliabel. Nunnally (1978) menyarankan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7 untuk menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima, sementara Tavakol & Dennick (2011) mencatat bahwa alpha yang sangat tinggi (lebih dari 0,9) bisa mengindikasikan redundansi item yang berlebihan. Di sisi lain, Composite Reliability (CR) adalah ukuran reliabilitas yang lebih unggul dibandingkan Cronbach's Alpha karena tidak terpengaruh oleh jumlah item dalam suatu konstruk. CR mengukur sejauh mana

indikator dalam konstruk dapat merepresentasikan konstruk tersebut, dengan perhitungan yang didasarkan pada beban faktor (factor loading) setiap indikator. Nilai CR yang lebih besar dari 0,7 dianggap baik, dan nilai lebih dari 0,8 dianggap sangat baik, sedangkan nilai di bawah 0,6 mengindikasikan masalah reliabilitas. Hair et al. (2010) merekomendasikan penggunaan CR karena CR lebih tepat dalam model berbasis PLS, karena memperhitungkan kontribusi setiap indikator terhadap konstruk. Gefen, Straub, & Boudreau (2000) juga mendukung penggunaan CR dalam penelitian berbasis PLS karena CR mengakomodasi variasi beban faktor dan lebih sesuai dengan karakteristik model-model PLS.

Tabel 4.9 Uji Reabilitas

Variabel	<i>Croanbach Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
Akuntabilitas (X1)	0.877	0.852
Transparansi (X2)	0.785	0.774
Kinerja pengelolaan Anggaran (Y)	0.801	0.798
SiPD (Z)	0.854	0.848

Hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan oleh Cronbach's Alpha dan Composite Reliability memberikan gambaran tentang tingkat konsistensi internal dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini. Untuk variabel Akuntabilitas (X1), nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,877 menunjukkan reliabilitas yang sangat baik, jauh di atas ambang batas minimum 0,7, yang berarti instrumen pengukuran untuk variabel ini sangat konsisten. Nilai Composite Reliability sebesar 0,852 juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa konstruk Akuntabilitas memiliki konsistensi internal yang kuat. Untuk variabel Transparansi (X2), nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,785 menunjukkan bahwa instrumen pengukuran untuk variabel ini cukup reliabel, dengan

tingkat konsistensi internal yang baik meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Akuntabilitas. Nilai Composite Reliability sebesar 0,774 menunjukkan hasil yang serupa, yang menandakan bahwa konstruk Transparansi juga dapat diandalkan dalam pengukuran variabel tersebut.

Pada variabel Kinerja Pengelolaan Anggaran (X3), Cronbach's Alpha sebesar 0,801 menunjukkan reliabilitas yang baik, dan nilai Composite Reliability sebesar 0,798 memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa pengukuran untuk variabel Kinerja Pengelolaan Anggaran sangat konsisten dan dapat dipercaya. Untuk variabel SiPD (Z), nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,854 menunjukkan reliabilitas yang sangat baik, lebih tinggi dari ambang batas 0,7, yang mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran untuk SiPD sangat konsisten. Nilai Composite Reliability sebesar 0,848 juga menunjukkan konsistensi internal yang baik untuk konstruk ini.

Secara keseluruhan, semua variabel yang diuji memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang lebih besar dari 0,7, yang menunjukkan bahwa instrumen pengukuran untuk setiap variabel dapat diandalkan dan memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga data yang diperoleh dari instrumen ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa masalah reliabilitas.

4.4.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah dilakukan analisis terhadap model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator terhadap konstruk atau variabel laten yang telah dirancang, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap model struktural (*inner model*). Model struktural digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel laten yang dibentuk berdasarkan landasan teori, serta untuk menguji

hipotesis penelitian (Abdillah & Hartono, 2015). Dalam penelitian ini, analisis model struktural mencakup beberapa tahapan pengujian, yaitu: 1) *Model Fit*, 2) *R-Square*, 3) *P-Values*, dan 4) *Effect Size*,

1. *Model Fit*

Model fit berfungsi untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara korelasi yang diobservasi dengan struktur model yang telah dibangun. Menurut Haryono (2016), kecocokan model dalam analisis PLS dapat ditentukan melalui nilai *loading factor* dari masing-masing indikator. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model analisis SEM dalam penelitian ini telah menunjukkan kecocokan (fit), karena telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang disyaratkan.

2. *R-Square*

R-Square atau koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kriteria kualitas model dan memprediksi hubungan antar variabel atau konstruk laten dengan mengacu pada koefisien determinasi (r^2) antara 0 dan 1 yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel laten atau konstruk eksogen terhadap variabel laten atau konstruk endogen (Chin, 1998). Nilai *R-Square* ada model penelitian ini dirangkum dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Kategori
SIPD (Z)	0,778	0,754	Kuat
Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,865	0,821	Kuat

Tabel 4.10 di atas menunjukkan nilai R-Square Adjusted atau nilai R-Square yang telah dikoreksi berdasarkan standar error untuk menilai kemampuan konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada substruktur pertama dalam diagram jalur (pengaruh variabel Akuntabilitas (X1), dan Transparansi (X2) terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)) memiliki nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,754. Artinya, perubahan yang terjadi pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z) dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel Akuntabilitas dan Transparansi sebesar 75,4%, yang termasuk dalam kategori kuat, sedangkan sisanya sebesar 24,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Selanjutnya, pada substruktur kedua dalam diagram jalur (pengaruh variabel Akuntabilitas (X1), dan Transparansi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z) terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)) menunjukkan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,821. Hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas dan Transparansi, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (Y) sebesar 82,1%, juga dalam kategori kuat, sementara sisanya sebesar 17,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. *P-Values* (Uji Signifikansi)

Uji signifikansi digunakan untuk menguji hipotesis penelitian serta mengidentifikasi pengaruh parsial secara langsung dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen, maupun pengaruh tidak langsung melalui

variabel intervening (Hamidi & Anwar, 2019). Dalam analisis PLS, pengujian signifikansi dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* terhadap model jalur (*path diagram*) yang telah dibangun. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi potensi masalah yang berkaitan dengan asumsi kenormalan data. Hasil uji signifikansi terhadap hipotesis langsung (*direct effect*) dirangkum dalam Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11. Uji Signifikansi Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Akuntabilitas (X1) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,306	0,387	0,423	3,017	0,027
Transparansi (X2) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,365	0,594	0,439	2,147	0,041

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode *Partial Least Squares* (PLS), diketahui bahwa variabel Akuntabilitas (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (original sample/O) sebesar 0,481 dengan nilai *P-Values* $0,027 < 0,05$ dan nilai statistik t sebesar $3,017 > 1,96$. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti Akuntabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Akuntabilitas dapat meningkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran sebesar 0,481 atau 48,1%.

Selanjutnya, variabel Transparansi (X2) juga terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y). Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien jalur (original sample/O) sebesar 0,301 dengan nilai P-Values $0,041 < 0,05$ dan nilai statistik t sebesar $2,147 > 1,96$. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) kembali diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, yang berarti Transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Transparansi dapat meningkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran sebesar 0,301 atau 30,1%.

Selanjutnya, hasil uji signifikansi terhadap hipotesis pengaruh moderasi dirangkum dalam Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12. Uji Signifikansi Pengaruh Moderasi

Model Pengaruh Tidak Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SIPD (Z) x Akuntabilitas (X1) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,683	0,403	0,592	3,827	0,020
SIPD (Z) x Transparansi (X2) → Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	0,542	0,266	0,558	2,738	0,033

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji signifikansi seberapa besar pengaruh SiPD (Z) terhadap terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) dengan memperhitungkan Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) sebagai variabel independen .Pertama, Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) dimoderasi SIPD (Z) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,094, dengan P-Values $0,020 < 0,05$ dan nilai t-statistic sebesar $3,827 > t\text{-tabel } 1,96$. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis

nol (H_0) ditolak, yang berarti SiPD mampu memperkuat hubungan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran melalui SIPD sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, SIPD memperkuat pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran, dengan besaran pengaruh tidak langsung sebesar 0,094 atau 9,4%.

Kedua, hasil pengujian Transparansi (X_2) terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y) dimoderasi oleh SIPD (Z) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,096, dengan P-Values $0,033 < 0,05$ dan nilai t-statistic sebesar $2,738 > t\text{-tabel } 1,96$. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya, SiPD mampu memperkuat hubungan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Dengan kata lain, SIPD mampu memperkuat hubungan antara Transparansi dan Kinerja Pengelolaan Anggaran, dengan kontribusi pengaruh tidak langsung sebesar 0,096 atau 9,6%.

Berdasarkan tabel hasil uji signifikansi yang disajikan, SIPD terbukti mampu memperkuat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis p-value yang menunjukkan hasil yang sangat meyakinkan. Pada analisis pengaruh langsung, akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan p-value sebesar $0,027 < 0,05$ dengan original sample 0,306 yang mengindikasikan pengaruh positif sebesar 30,6%, sementara transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran memperoleh p-value $0,041 < 0,05$ dengan original sample 0,365 atau pengaruh positif sebesar 36,5%. Kedua hubungan langsung ini menunjukkan signifikansi statistik yang kuat, namun ketika dimoderasi oleh

SIPD, kekuatan hubungan tersebut mengalami peningkatan yang sangat substansial.

Analisis pengaruh moderasi memperlihatkan bahwa interaksi SIPD dengan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran menghasilkan p-value $0,020 < 0,05$ dengan original sample 0,683 atau pengaruh positif sebesar 68,3%, sementara interaksi SIPD dengan transparansi memperoleh p-value $0,033 < 0,05$ dengan original sample 0,542 atau pengaruh positif sebesar 54,2%. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan, dimana akuntabilitas mengalami peningkatan dari 0,306 menjadi 0,683 atau peningkatan sebesar 0,377 (37,7%), sedangkan transparansi meningkat dari 0,365 menjadi 0,542 atau peningkatan sebesar 0,177 (17,7%). Fakta bahwa semua p-value menunjukkan nilai di bawah 0,05 membuktikan bahwa tidak hanya pengaruh langsung akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja yang signifikan, tetapi juga pengaruh moderasi SIPD secara statistik terbukti valid dan bukan merupakan kebetulan belaka.

Kekuatan moderasi SIPD semakin terkonfirmasi melalui perbandingan p-value yang menunjukkan bahwa pengaruh moderasi memiliki tingkat kepercayaan statistik yang lebih tinggi dibandingkan pengaruh langsung. P-value untuk interaksi SIPD dengan akuntabilitas (0,020) lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung akuntabilitas (0,027), begitu pula p-value untuk interaksi SIPD dengan transparansi (0,033) lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung transparansi (0,041). Hal ini mengindikasikan bahwa moderasi SIPD tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga memberikan tingkat kepastian statistik yang lebih tinggi dalam prediksi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran.

Selanjutnya perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung pada model struktural penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Keputusan
H1	Akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran	Diterima
H2	Transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran	Diterima
H3	Akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dengan dimoderasi SIPD	Diterima
H4	Transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dengan dimoderasi SIPD	Diterima

4.5 Pembahasan

4.5.1 Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,027 < 0,05$, dan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,492, yang mengindikasikan arah hubungan yang positif. Artinya, besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran adalah sebesar 49,2%. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja yang dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika akuntabilitas menurun, maka kinerja pun akan turut menurun.

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, masyarakat secara umum memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan. Hampir seluruh indikator memperoleh penilaian “Baik” dan “Sangat Baik”, dengan total persentase keduanya melampaui 80% pada setiap aspek akuntabilitas yang dinilai. Pada aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, responden menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas birokrasi. Kepatuhan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan dinilai baik, mencerminkan legalitas dan profesionalitas kerja. Demikian pula, praktik pengelolaan anggaran yang jujur dan terbuka mendapat apresiasi positif, menandakan adanya kepercayaan terhadap transparansi penggunaan dana publik. Meski terdapat sebagian kecil responden yang menilai kurang baik, hal ini lebih disebabkan oleh persepsi negatif atau pengalaman tertentu terkait potensi penyimpangan.

Pada dimensi akuntabilitas proses, masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap prosedur kerja, transparansi, serta partisipasi publik dalam perencanaan anggaran. Mekanisme kerja yang sesuai prosedur dan evaluasi rutin dinilai positif, meskipun sebagian kecil responden menganggap masih ada keterbatasan akses informasi atau belum merasakan dampak langsung dari evaluasi tersebut. Selanjutnya, penilaian terhadap akuntabilitas program juga menunjukkan tren positif. Indikator kinerja program dinilai jelas, terukur, dan memiliki tujuan konkret. Sistem pengawasan berjalan efektif, sementara hasil program telah digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Dalam aspek akuntabilitas kebijakan, publik menilai bahwa

kebijakan anggaran pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini tercermin dari orientasi kebijakan yang memperhatikan kebutuhan publik, keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, serta adanya pertanggungjawaban kebijakan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan survei ini memperkuat hasil pengujian kuantitatif bahwa akuntabilitas memainkan peran strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap aspek hukum, proses, program, dan kebijakan menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas telah berjalan relatif baik dan mendukung tercapainya efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, adanya sebagian kecil responden yang menilai kurang baik menjadi catatan penting bahwa pemerintah daerah perlu terus memperbaiki mekanisme transparansi, memperluas akses informasi publik, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, akuntabilitas yang kuat tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Akuntabilitas memiliki peran krusial dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran, khususnya dalam konteks organisasi publik seperti instansi pemerintahan. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana suatu entitas mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil pengelolaan anggarannya kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan otoritas pengawas (Sains, 2018). Ketika akuntabilitas terjaga dengan baik melalui pelaporan yang transparan, penggunaan anggaran yang sesuai peraturan, serta evaluasi berkala maka proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran cenderung lebih efisien dan tepat sasaran (Saraswati & Suhartini, 2022). Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, yang ditunjukkan dengan tercapainya target program, efektivitas penggunaan dana, dan minimnya penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Veronika & Nugraeni, 2023).

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori *stewardship theory* (*stewardship theory*), yang menekankan bahwa pejabat publik (*steward*) secara inheren termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik sumber daya, dalam hal ini masyarakat. Dalam konteks pengelolaan anggaran, akuntabilitas menjadi cerminan dari komitmen moral dan profesional aparat pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketika prinsip akuntabilitas dijalankan dengan baik, pejabat publik akan lebih berfokus pada pencapaian tujuan program, efisiensi penggunaan dana, serta pelaporan hasil secara transparan. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga pemerintah dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Teori *stewardship* mendukung pandangan bahwa akuntabilitas bukan semata kewajiban formal, melainkan juga bentuk kesetiaan dan tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya publik secara optimal.

Pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran secara langsung menjawab rumusan masalah pertama, yaitu rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Permasalahan ini tercermin dari masih ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta lemahnya mekanisme evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah dalam tata kelola anggaran yang berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini mengandung makna bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan, semakin besar pula peningkatan kinerja yang dapat dicapai. Temuan ini menegaskan bahwa upaya memperkuat akuntabilitas melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelaporan yang transparan, serta evaluasi yang konsisten mampu mendorong efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas akan berdampak pada lemahnya pengawasan, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana, serta kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai target program. Kontribusi akuntabilitas terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas tata kelola keuangan. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, proses alokasi anggaran dapat lebih terkendali, penggunaan dana lebih tepat sasaran, dan hasil program dapat diukur serta dipertanggungjawabkan secara jelas. Hal ini

memberikan jaminan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik digunakan sesuai tujuan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar aspek administratif, tetapi fondasi utama dalam menjamin bahwa seluruh tahapan anggaran — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi — dilaksanakan secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan. Ketika akuntabilitas diterapkan dengan baik, maka proses pengelolaan anggaran akan lebih terkendali, kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalkan, dan penggunaan dana lebih tepat sasaran. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas akan berdampak pada lemahnya pengawasan, pelanggaran terhadap regulasi, serta kegagalan dalam mencapai tujuan program. Oleh karena itu, pembahasan ini menjelaskan bahwa untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, peningkatan akuntabilitas menjadi langkah strategis yang harus ditempuh, sejalan dengan prinsip *stewardship* yang menekankan tanggung jawab moral dan profesional aparaturnya dalam mengelola keuangan publik secara optimal.

Hasil ini sejalan dengan temuan dari beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Edowaty (2021), Suryani & Hidayat (2023), Azizah & Hidayat (2023), Binawati & Badriyah (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sektor publik. Akuntabilitas mendorong pejabat publik untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika pemerintah daerah mempertanggungjawabkan setiap keputusan anggaran secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, maka

pengawasan menjadi lebih optimal, kinerja dapat dievaluasi secara objektif, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Dengan demikian, akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

4.5.2 Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,041 < 0,05$, serta nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,301, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, besarnya pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran adalah sebesar 30,1%. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam proses pengelolaan anggaran, maka semakin baik pula kinerja yang dapat dicapai. Sebaliknya, rendahnya transparansi akan berdampak pada menurunnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden mengenai transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, secara umum masyarakat memberikan penilaian yang sangat baik terhadap keterbukaan informasi pemerintah daerah. Hampir seluruh indikator memperoleh persentase yang dominan pada kategori “Baik” dan “Sangat Baik”, yang mengindikasikan tingginya kepercayaan publik terhadap upaya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingginya apresiasi publik ini menunjukkan bahwa praktik transparansi yang dijalankan telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas

kinerja pengelolaan anggaran. Pada aspek kesesuaian informasi, mayoritas responden menilai bahwa laporan anggaran yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mudah dipahami. Hal ini mencerminkan bahwa penyajian data yang valid, jelas, dan komprehensif mampu memperkuat legitimasi laporan keuangan, sehingga mendukung akuntabilitas sekaligus memperbaiki kualitas pengambilan keputusan anggaran. Kejelasan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran yang mudah dipahami juga memperkuat efektivitas komunikasi publik, sehingga proses evaluasi dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, keterbukaan akses informasi keuangan terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Masyarakat merasa lebih mudah memperoleh informasi terkait perencanaan maupun realisasi anggaran, baik melalui saluran langsung maupun platform digital. Kemudahan akses ini mendukung terciptanya mekanisme pengawasan publik yang lebih kuat, yang pada gilirannya menekan potensi penyimpangan serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien. Dengan kata lain, keterbukaan akses informasi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memperkuat kualitas tata kelola anggaran. Lebih jauh, transparansi informasi juga terbukti meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Informasi yang terbuka membuat masyarakat dapat memahami alur perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat secara lebih aktif dalam mengawasi maupun memberikan masukan. Kondisi ini selaras dengan prinsip good governance, di mana keterlibatan masyarakat dalam siklus anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih efektif, tepat

sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Akhirnya, transparansi dalam penyampaian informasi keuangan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah daerah. Tingginya keyakinan masyarakat bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab memperkuat persepsi positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan tata kelola, tetapi juga merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Transparansi dalam konteks ini merujuk pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi anggaran, mereka dapat ikut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi, yang pada akhirnya menciptakan tekanan positif bagi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan efisien dalam mengelola anggaran (Saraswati & Suhartini, 2022). Transparansi dan kinerja pengelolaan anggaran bersifat signifikan dan saling memperkuat. Pemerintah daerah yang transparan akan cenderung menyusun anggaran secara realistis, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan prioritas, serta melaporkan hasil penggunaan anggaran secara jujur dan terbuka. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, karena adanya pengawasan publik mendorong perilaku yang akuntabel dari para pengelola anggaran. Selain itu,

transparansi juga meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran karena setiap transaksi dan kebijakan dapat ditelusuri serta dinilai oleh publik (Dewi & Hadiprajitno, 2023).

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang terbuka, jelas, dan mudah diakses terkait seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi dan evaluasi. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Tingkat transparansi yang tinggi juga memperkuat mekanisme pengawasan publik. Masyarakat, media, maupun lembaga pengawas eksternal dapat lebih mudah melakukan kontrol terhadap potensi penyimpangan, sehingga ruang untuk praktik korupsi, penyalahgunaan dana, atau kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisasi. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang mendorong pejabat publik bekerja secara lebih hati-hati, jujur, dan profesional. Lebih jauh, transparansi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih berkualitas terkait prioritas program dan kebutuhan daerah. Hal ini menjadikan proses penyusunan kebijakan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, transparansi secara

langsung berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta menjadi salah satu indikator kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hasil penelitian ini secara jelas menjawab rumusan masalah tentang kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, seperti keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan atau ketidaksesuaian antara data yang disajikan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil pengujian empiris yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran dengan nilai pengaruh sebesar 30,1%. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, semakin baik pula kinerja pengelolaan anggaran yang dapat dicapai. Transparansi yang dimaksud mencakup keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi anggaran secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat diakses publik. Ketika laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu serta mencerminkan kondisi riil di lapangan, hal ini memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas melakukan evaluasi serta pengawasan yang lebih efektif, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau manipulasi data. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya menjelaskan pentingnya transparansi sebagai prinsip good governance, tetapi juga menunjukkan bahwa rendahnya transparansi—yang tercermin dari keterlambatan laporan atau ketidaksesuaian data—dapat melemahkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja anggaran. Dengan meningkatkan transparansi, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah pun akan terbangun, dan sistem pengelolaan anggaran dapat berjalan secara lebih efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Hasil ini sejalan dengan temuan dari beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Utami & Haryati (2023), Sumanto (2021), Saraswati & Suhartini (2022), serta Dewi & Hadiprajitni (2023), yang menyatakan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sektor publik. Transparansi mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses informasi anggaran secara jujur, terbuka, dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika masyarakat dan lembaga pengawas memiliki akses terhadap informasi anggaran yang memadai, maka proses pengawasan dapat dilakukan secara optimal, kinerja dapat dievaluasi secara objektif, dan akuntabilitas publik dapat ditegakkan.

4.5.3 Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dimoderasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memoderasi hubungan antara Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Anggaran secara positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (p -value) sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,094. Artinya, keberadaan SIPD mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran sebesar 9,4%. Semakin optimal pemanfaatan SIPD dalam mendukung akuntabilitas, maka semakin besar pula peningkatan kinerja pengelolaan anggaran yang dapat dicapai. Sebaliknya, jika penggunaan SIPD tidak dimaksimalkan, maka efek akuntabilitas terhadap kinerja juga akan berkurang.

Hasil survei terhadap 100 responden menunjukkan bahwa implementasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan sangat baik, dengan skor rata-rata pada setiap indikator berada di kisaran 4,4–4,6. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat maupun pengguna internal terhadap berbagai aspek sistem, mulai dari keamanan data, kecepatan akses, ketelitian, fleksibilitas pelaporan, hingga relevansi sistem terhadap kebutuhan organisasi. Secara khusus, SIPD terbukti memberikan jaminan keamanan data yang kuat, kemudahan akses informasi, serta ketelitian dalam mengolah dan menyajikan data anggaran secara real-time. Fitur fleksibilitas pelaporan memungkinkan berbagai unit kerja memperoleh informasi sesuai kebutuhan, sementara keselarasan fungsi sistem dengan kebutuhan manajemen anggaran mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Hasil ini menunjukkan bahwa SIPD bukan hanya sekadar instrumen teknis, tetapi juga berperan sebagai infrastruktur strategis yang menopang pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.

Selaras dengan temuan tersebut, hasil survei mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran juga menunjukkan penilaian yang sangat positif. Lebih dari 80% responden menilai aspek akuntabilitas hukum, proses, program, maupun kebijakan dengan kategori Baik dan Sangat Baik. Tingginya penilaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi, kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta orientasi kebijakan pada kepentingan masyarakat. Misalnya, pada indikator akuntabilitas hukum, 52% responden menilai kepatuhan terhadap peraturan sebagai “Sangat Baik”, sedangkan

pada akuntabilitas program, 50% menilai pengawasan program berjalan efektif. Keterkaitan antara kedua temuan ini terlihat jelas: keberhasilan implementasi SIPD berkontribusi langsung pada penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran. SIPD memperkuat aspek akuntabilitas hukum melalui pencatatan digital yang terdokumentasi rapi, memperbaiki akuntabilitas proses melalui prosedur input dan evaluasi yang sistematis, mendukung akuntabilitas program dengan laporan kinerja yang terukur, serta mendorong akuntabilitas kebijakan melalui penyediaan informasi yang relevan bagi publik. Dengan kata lain, SIPD menjadi sarana utama yang memastikan setiap tahap pengelolaan anggaran – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban – dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, integrasi antara kualitas implementasi SIPD dan tingginya persepsi publik terhadap akuntabilitas membuktikan bahwa sistem ini mampu memperkuat kinerja pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Selain meningkatkan efisiensi internal, SIPD juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Keadaan ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana teknologi informasi publik berperan sebagai katalisator terciptanya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran yang dimoderasi oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara langsung menjawab rumusan masalah mengenai belum optimalnya konsistensi

perencanaan dan penganggaran di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023. Ketidakkonsistenan dalam perencanaan dan penganggaran umumnya mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan tidak maksimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran, dengan nilai pengaruh sebesar 9,4%. Artinya, ketika akuntabilitas didukung oleh SIPD yang terintegrasi dan dioptimalkan, maka proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih konsisten, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. SIPD memungkinkan keterlacakan setiap tahapan perencanaan hingga realisasi anggaran, serta memberikan informasi yang real time dan terdokumentasi secara sistematis, sehingga mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Dalam konteks Bappelitbang Sumatera Utara, ketidakoptimalan konsistensi perencanaan dan penganggaran dapat dikaitkan dengan belum maksimalnya pemanfaatan SIPD sebagai alat kontrol dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan anggaran memerlukan akuntabilitas yang diperkuat melalui dukungan teknologi informasi seperti SIPD, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga membangun dasar tata kelola yang konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, penerapan SIPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dalam pencatatan dan pelaporan anggaran, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Melalui fitur keterbukaan data, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan luas terhadap

informasi anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi. Dengan adanya transparansi ini, publik dapat memantau alokasi dana ke berbagai sektor pembangunan, menilai kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini. Sistem ini sekaligus mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. SIPD menyediakan ruang bagi publik untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap program yang dijalankan, sehingga kontrol sosial terhadap pemerintah semakin kuat. Partisipasi ini bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan anggaran, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegah penyalahgunaan dana publik. Dengan demikian, SIPD secara langsung berperan dalam menekan peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran.

Lebih jauh, moderasi SIPD terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadikan sistem tata kelola anggaran lebih terbuka, efisien, dan bertanggung jawab. Pejabat publik didorong untuk bekerja lebih hati-hati karena setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dilihat dan dievaluasi oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun iklim pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, peran SIPD dalam memperkuat akuntabilitas menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan, karena masyarakat lebih mungkin menerima dan mendukung program pemerintah ketika mereka yakin bahwa dana publik dikelola

secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, keberadaan SIPD menjadikan akuntabilitas bukan hanya konsep normatif, tetapi praktik nyata yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Hasil ini sejalan dengan temuan dari beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Novrianti & Cahyaningdyah (2022), Saraswati & Suhartini (2022), Utami & Haryati (2023), Afriyanto & Sunardi (2024), Suryani & Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sektor publik. Dalam konteks ini, sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran. SIPD memungkinkan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, memudahkan akses informasi bagi publik dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan dan pengawasan. Ketika akuntabilitas didukung dengan sistem informasi yang baik, setiap keputusan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih terbuka, yang pada gilirannya meningkatkan pengawasan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas yang tinggi, yang dimoderasi oleh SIPD, akan memperkuat kinerja pengelolaan anggaran daerah secara signifikan.

4.5.4 Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran dimoderasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa SIPD juga memoderasi hubungan antara Transparansi dan Kinerja Pengelolaan Anggaran secara positif dan signifikan. Nilai signifikansi (p-value) tercatat sebesar $0,033 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur (original sample)

sebesar 0,096. Hal ini mengindikasikan bahwa SIPD memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran sebesar 9,6%. Dengan demikian, semakin baik integrasi transparansi dalam penggunaan SIPD, maka semakin efektif pula kinerja pengelolaan anggaran yang dapat diwujudkan. Sebaliknya, pemanfaatan SIPD yang kurang optimal dapat memperlemah pengaruh transparansi terhadap kinerja.

Hasil survei menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan aksesibilitas data dalam pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik, di mana lebih dari 80% responden menilai baik dan sangat baik terhadap transparansi anggaran yang dinilai akurat, jelas, dan mudah dipahami. Penilaian positif ini selaras dengan implementasi SIPD, yang menurut 45%–50% responden sangat memudahkan akses data secara cepat, tepat, dan real-time. SIPD tidak hanya memastikan keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga menjaga ketelitian dan validitas data melalui sistem yang mampu meminimalisir kesalahan manusia serta menghasilkan laporan fleksibel sesuai kebutuhan unit kerja. Perlindungan data yang dinilai sangat baik oleh 44%–45% responden semakin memperkuat kepercayaan publik, sebagaimana ditunjukkan oleh 49% responden yang yakin dana publik dikelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, SIPD berperan sebagai instrumen teknis yang menjamin transparansi berjalan kredibel, akurat, dan aman, sekaligus memperkuat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lebih jauh, keterbukaan informasi yang ditunjang SIPD terbukti mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Sebanyak 49% responden menilai sangat baik terhadap peran transparansi dalam meningkatkan keterlibatan

masyarakat, dan SIPD melengkapi fungsi ini dengan menyediakan akses terhadap alokasi dana lintas unit kerja serta laporan yang mudah dipahami publik. Selain itu, 46%–49% responden menilai SIPD sangat baik dalam menyediakan informasi strategis yang relevan dengan kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Artinya, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memperkokoh kepercayaan publik melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran adalah aspek fundamental dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan anggaran dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Transparansi ini meliputi informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran yang seharusnya disampaikan secara terbuka dan jelas agar dapat dipertanggungjawabkan (Dewi & Hadiprajitno, 2023). Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memonitor dan mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sumanto, 2021).

Pembahasan mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran yang dimoderasi oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara langsung menjawab dua rumusan masalah yang diajukan, yaitu (2) kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, seperti keterlambatan laporan keuangan atau ketidaksesuaian data, serta (3) belum optimalnya konsistensi perencanaan dan

penganggaran di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berperan memperkuat hubungan antara transparansi dan kinerja pengelolaan anggaran secara positif dan signifikan, dengan pengaruh sebesar 9,6%. Artinya, penerapan transparansi yang diintegrasikan secara optimal ke dalam SIPD memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilakukan secara lebih terbuka, akurat, dan tepat waktu. Keterlambatan penyajian laporan keuangan maupun ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan umumnya disebabkan oleh proses manual, tidak terdokumentasi dengan baik, atau rendahnya akses informasi antarunit kerja. Dengan adanya SIPD, informasi dapat disajikan secara sistematis, real time, dan terdokumentasi sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi serta konsistensi data antarperiode. Dalam konteks Bappelitbang Sumatera Utara, integrasi transparansi melalui SIPD dapat membantu memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran melalui pelaporan yang lebih efisien dan mudah diakses lintas OPD. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi, yang dimoderasi oleh SIPD, merupakan solusi strategis untuk mengatasi ketidaktepatan data dan inkonsistensi dalam proses perencanaan serta penganggaran, sekaligus memperkuat kinerja pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran yang dimoderasi oleh SIPD menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Transparansi yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui perencanaan, alokasi, serta realisasi penggunaan dana, sementara SIPD memastikan bahwa informasi tersebut tersaji secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Lebih jauh, keberadaan SIPD memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran karena sistem ini mampu meminimalisir potensi kesalahan, penyalahgunaan, maupun duplikasi data. Dengan perlindungan keamanan data yang kuat, SIPD menjaga integritas laporan keuangan dan memperkuat legitimasi publik terhadap hasil pembangunan. Kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintah daerah merupakan modal sosial penting yang mendorong partisipasi lebih besar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan transparansi yang didorong oleh teknologi seperti SIPD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan anggaran tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga membawa manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan temuan dari beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Saraswati & Suhartini (2022), Utami & Haryati (2023), Afriyanto & Sunardi (2024), Suryani & Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sektor publik. Dalam konteks ini, sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dapat memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran. SIPD memungkinkan proses pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih terbuka dan akurat, memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi terkait alokasi dan

penggunaan anggaran, serta mendukung efisiensi dalam pelaporan dan evaluasi. Ketika transparansi didukung oleh sistem informasi yang baik, proses pengelolaan anggaran menjadi lebih mudah dipantau, pengawasan lebih efektif, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran meningkat. Dengan demikian, transparansi yang tinggi, yang dimoderasi oleh SIPD, akan memperkuat kinerja pengelolaan anggaran daerah secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam akuntabilitas akan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima.
2. Transparansi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Artinya, peningkatan transparansi dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima.
3. SiPD berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran menjadi lebih kuat ketika dimoderasi oleh SiPD. Dengan demikian, hipotesis ini diterima.
4. SiPD memoderasi pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SiPD mampu memperkuat hubungan antara transparansi dan kinerja pengelolaan anggaran. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan sebesar 49,2% terhadap kinerja pengelolaan anggaran, maka diperlukan strategi untuk memperkuat berbagai dimensi akuntabilitas, baik hukum, proses, program, maupun kebijakan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler terkait peraturan terbaru, perbaikan standar operasional prosedur, serta pengembangan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil. Transparansi yang berkontribusi positif sebesar 30,1% juga harus ditingkatkan melalui penyediaan portal anggaran yang ramah pengguna, pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat, serta sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami informasi anggaran dengan mudah. Dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, pemerintah daerah dapat meningkatkan legitimasi pengelolaan keuangan sekaligus membangun kepercayaan publik.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja sebesar 9,4% dan transparansi terhadap kinerja sebesar 9,6%. Oleh karena itu, optimalisasi SIPD menjadi langkah strategis melalui peningkatan kapasitas sistem, integrasi lintas unit kerja, serta pengembangan fitur analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keberhasilan SIPD juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan pelatihan intensif, tim pendukung IT yang responsif, serta manual penggunaan yang komprehensif. Integrasi SIPD dengan sistem informasi lainnya serta pengembangan dashboard monitoring real-time akan semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Untuk mendukung keberlanjutan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan partisipasi publik harus dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem perencanaan yang selaras dengan dokumen strategis, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta melibatkan pihak eksternal untuk menjamin objektivitas. Partisipasi masyarakat dapat diperluas melalui literasi anggaran, forum konsultasi publik, serta kanal pengaduan yang mudah diakses. Implementasi seluruh rekomendasi ini perlu dijalankan secara bertahap, dimulai dari penguatan sistem dan SDM dalam jangka pendek, integrasi dan partisipasi publik dalam jangka menengah, hingga evaluasi komprehensif pada jangka panjang. Dengan dukungan politik, regulasi, dan koordinasi lintas instansi, pengelolaan anggaran akan lebih efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance, yang pada akhirnya mendorong pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, D., Sunardi, S., & Sisharini, N. (2024). Pengaruh Perencanaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Melalui Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* (MEA), 8(3), 1115-1140.
- Aji Pangestu, B. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (*Doctoral dissertation*, IPDN).
- Andhayani, A., & Eltivia, N. (2022). The Effect of Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on Regional Financial Transparency in Local Governments. *Judicious*, 3(2), 364–369. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1162>
- Anggraini, D., Heriningsih, S., & Windyastuti, W. (2021). The Influence of Accountability, Transparency and Supervision on Budgeting Performance with the Concept of Value for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Regency. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 704–713. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1419>
- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Anggaran, Pengelolaan Anggaran, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 2017.
- Arifani, C., Agustinus Salle, yahoocoid, & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value for Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Anggaran*, 13(1), 68–82. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JAKED/article/view/1426/1125>
- Afrianto, D., Sunardi, S., & Sisharini, N. (2024). PENGARUH PERENCANAAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI PENGAWASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* (MEA), 8(3), 1115-1140.
- Arifiyanto, D., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). the Effect of Accountability, Transparency, Budget Participation on Managerial Performance With Budget Effectiveness As Intervening Variables At Jember University. *American Research Journal of Humanities Social Science*, 07, 72–77. www.arjhss.com
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>

- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Journal of Student Research*, 1(2), 155-175.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Anggaran, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32-49.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13(4), 447-468.
- Boyoh, J. K., P.E. Saerang, D., & Swandari Budiarto, N. (2022). Analisis Penerapan Good Governance Dalam Penyusunan Anggaran Skpd Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 3(2), 164–178.
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Darmasto, N., & Saputro, B. M. (2024). Pengaruh Penguasaan Teknik Informatika dan Aplikasi SIPD terhadap Efektivitas Penyusunan RKA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. *Otonomi*, 24(2), 376-382.
- Defitri, S. Y. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(1), 40–49. <https://doi.org/10.53494/jira.v8i1.100>
- Dewi, B. S., & Hadiprajitno, P. T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Dewi, M., Sumiati, N., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 621–624. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4500>
- Fernanda, J. W., Luthifiana, V., & Akhyar, M. K. (2022). Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk Pemodelan Penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS). *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika*, 15(2), 292–297. <https://doi.org/10.36456/jstat.vol15.no2.a6436>
- Fitrianingsi, N., Santoso, B., & Pituringsih, E. (2023). Effectiveness of Regional

- Financial Management With the Regional Government Information System (Sipd) As the Intervening Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144(12), 93–103. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-12.11>
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Garson, G. D. (2016). Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models. In *Multi-Label Dimensionality Reduction*. Statistical Publishing Associates. <https://doi.org/10.1201/b16017-6>
- Hani, S., & Alpi, M. F. (2023). Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja OPD. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
- Harnovinsah, Al-Hakim, Y., Erlina, & Muda, I. (2020). Effect of accountability, transparency and supervision on budget performance. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra 7), 130–143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009622>
- Harun, B., Muslimin, & Yamin Nina. (2021). Effect Regional Financial Management and Regional Management Information System on Financial Performance. *International Journal of Engineering Sciences & Research Technology*, 10(2), 103–111.
- Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. *Computational Statistics*, 28(2), 565–580. <https://doi.org/10.1007/s00180-012-0317-1>
- Hidayati, S., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2023). Accountability in Village Government: The Role of the Internal Control System as Moderation. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 9(2), 73–84. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v9i2.2597>
- Himawan Pradipta, Achmad, & Siti Rohmah. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Bulusari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(2), 80–91. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2022.v3i2.80-91>
- Ilyas, E., Ivana, F., Mediyanti, S., Ridha, A., & Masri. (2024). The Influence Of Accountability, Transparency And Supervision On Budget Performance At Higher Education Service Institutions Region XIII Aceh. *JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business Available*, 5(1), 1–23.
- Irfan., Saprinah Manulang., & Syafrida Hani., (2024). Metodologi Penelitian Bisnis dan Konsep Aplikasi. Medan: Umsu Press.
- Irwan, & Adam, K. (2020). Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya.

Teknosains, 9(1), 53–68.

- Irwansyah. (2023). Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Pada Kinerja Pengelola Keuangan dan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 266–278. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v11i2.68301>
- Januri, J., & Alpi, M. F. (2024). Peranan Efektifitas Pengelolaan dana desa: Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 7(3), 46-54.
- Josafat, W., Titaley, A., Usmany, P., & Hariyanti, D. (2024). Financial Accounting System On Local Government Performance : Application Of Performance-Based Budgeting As A Moderation Variable (Empirical Study On Central Maluku Regency Government) Daerah Dan Sistem Aku. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(33), 6216–6230.
- Kartika, I. G. A. Y., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3375. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p05>
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. . (2023). Pengaruh Pengelolaan Anggaran, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Anggaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468.
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency Is Not Enough: Making Transparency Effective In Reducing Corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301-322.
- Lubis, R. Y., Zainuddin, & Rumina, C. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020. *Serambi Konstruktivis*, 1(12), 2439–2450.
- Mahesa, G. N. A., & Astawa, I. G. P. B. (2024). Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se Provinsi Bali Dengan Indikator Rasio Keuangan Sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2022. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(01), 174–186. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.75967>
- Manoe, D. S., Koten, Y. P., & Rozady, M. P. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, 9(1).
- Marliana, R. R. (2019). Partial Least Square-Structural Equation Modeling Pada Hubungan Antara Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dan Kualitas Google Classroom Berdasarkan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Matematika, Statistika*

- Dan Komputasi*, 16(2), 174. <https://doi.org/10.20956/jmsk.v16i2.7851>
- Marniati, P., & Fiddin, F. (2023). Implementasi Transaksi Tunai dan Non Tunai sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKAD Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi ...*, 4(2), 157–162. <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/3528%0Ahttp://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/viewFile/3528/1650>
- Merchilia, S., & Robinson. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5326–5338. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1134>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 181–197. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3738>
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1007>
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SIPD dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan : Pentingnya Kompetensi SDM. 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Human Falah*, 3(1), 93-112.
- Nasirwan, M. M. R. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko DI Kota Beureunuen). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.180>
- Novelya Suoth, Jantje Tinangon, & Sintje Rondonuwu. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(1), 613–622.
- Novrianti, D., Rusdarti, R., & Cahyaningdyah, D. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Unit Kerja Universitas Negeri Semarang.

- Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 121-133.
- Nuha, S. U. (2022). the Influence of Accountability and Transparency on Budget Management. *International Journal Accounting and Management Research*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v1i1.2>
- Nurazizza, V., & Sudrajat, M. A. (2023). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Badan Anggaran Kabupaten Ngawi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 5(September).
- Prihatin, M., & Mustaqim, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 5, 18–36. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3590%0Ahttp://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/3590/1847>
- Purnamasari, R., Hasanudin, A., Zulfikar, R., & Ramdhani, D. (2024). The Role of the Internal Control System in Strengthening the Relationship between the Use of Information Technology, Accountability, and Village Government Performance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2329847>
- Rahadi, D. R. (2023). *Pengantar Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM)* (Wijonarko (ed.); Lentera II).
- Ratih, D., & Ratnawati, D. (2023). The Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Value for Money based Budget Performance in Mojokerto City. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 6(2), 295–300. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v6i2.2183>
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabiiitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1-10.
- Saraswati, N. P. A., & Suhartini, D. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 459. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.569>
- Sari, R., Muslim, M., & Sari, M. M. (2021). The Role of Internal Control System on Characteristics of Village Financial Reports. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 222. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.807>
- Sari, R. P., Rice Haryati, & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Kinerja Aparatur

- Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Anggaran Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 183–192. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.852>
- Sholiha, E. U. N., & Salamah, M. (2015). Structural Equation Modeling-Partial Least Square untuk Pemodelan Derajat Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur 2013). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 169–174. http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10443
- Sikumbang, S., & Marliyah, M. (2022). Analysis of the Financial Performance of the Regional Development Planning Agency (Bappelitbang) of North Sumatra Province. *Jurnal Fokus Manajemen*, 2(2), 153–160. <https://doi.org/10.37676/jfm.v2i2.3393>
- Silvia, R., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Time Pressure Dan Pemahaman Sistem Informasi terhadap Kualitas Audit dengan Due Professional Care sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4475–4489.
- Sipahutar, B. P., Rahwani, D. A., & Zebua, D. F. (2024). Analysis of the influence of regional financial management, accountability and transparency on government financial performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(4), 218–222.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>
- Sumanto, R. (2021). PEngaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (studi pada badan pusat statistik kota jambi dan Provinsi jambi) (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 228–247.
- Suwanti, S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3621/3637>
- Swandewi, K. D., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 14(04), 1132–1143. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.50776>

- Temalagi, S., Anakotta, F. M., & Siahaya, M. D. (2022). The effect of accountability, transparency and internal control on value for money- based budget performance. *3rd International Seminar on Accounting Society "The Review and Outlook of The Economy after Covid 19 Pandemic,"* 257–270.
- Tumija, T., Hendra, A., Sinurat, M., & Ali, H. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 79-91.
- Utami, H. R., & Haryati, T. (2023). Budgetary Goal Characteristics, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi. *Jambura Economic Education Journal*, 5(2), 100-111.
- Yenti, M. P., Yentifa, A., & Mustika, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Komite Pada Sma Negeri 9 Sijunjung. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 59–75.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).
- Yulita, R., Apriani, N., & Dewi Fitrianiingsih, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6(No. 12), 1975–1982. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586>
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23.
- Zulfikar, T., & Aripin, Z. (n.d.). Influence of Competence and Application Local Government Information System (Sipd) Encouraging the Quality of Financial Management At the. *Jesocin*, 1–16.

Lampiran 1. Kuesioner Kinerja Pengelolaan Anggaran

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kemandirian Anggaran						
1.	Pemerintah daerah kami mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).					
2.	Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi. <i>(reverse statement)</i>					
3.	Pemerintah daerah memiliki strategi yang jelas untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.					
Efektivitas Anggaran						
4.	Alokasi anggaran daerah secara umum telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.					
5.	Program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.					
6.	Realisasi belanja daerah sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.					
Efisiensi Anggaran						
7.	Penggunaan anggaran daerah dilakukan dengan prinsip penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.					
8.	Setiap kegiatan yang dibiayai APBD memiliki analisis biaya-manfaat yang memadai.					
9.	Proses pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan.					
Pertumbuhan Pendapatan						
10	Pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru secara berkelanjutan.					
11	Peningkatan pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan layanan publik.					
12	Pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.					

Lampiran 2. Kuesioner Akuntabilitas

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Akuntabilitas hukum dan kejujuran						
1.	Pegawai di lingkungan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
2.	Praktik pengelolaan anggaran dilakukan secara jujur dan terbuka.					
3.	Setiap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.					
Akuntabilitas Proses						
4.	Proses perencanaan anggaran dilakukan secara partisipatif dan transparan.					
5.	Mekanisme kerja pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.					
6.	Proses evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.					
Akuntabilitas Program						
7.	Setiap program yang dilaksanakan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.					
8.	Pelaksanaan program diawasi untuk menjamin hasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan.					
9.	Hasil pelaksanaan program digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.					
Akuntabilitas Kebijakan						
10	Kebijakan anggaran yang ditetapkan berorientasi pada kepentingan publik.					
11	Penyusunan kebijakan anggaran mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.					
12	Pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan kebijakan anggaran kepada masyarakat.					

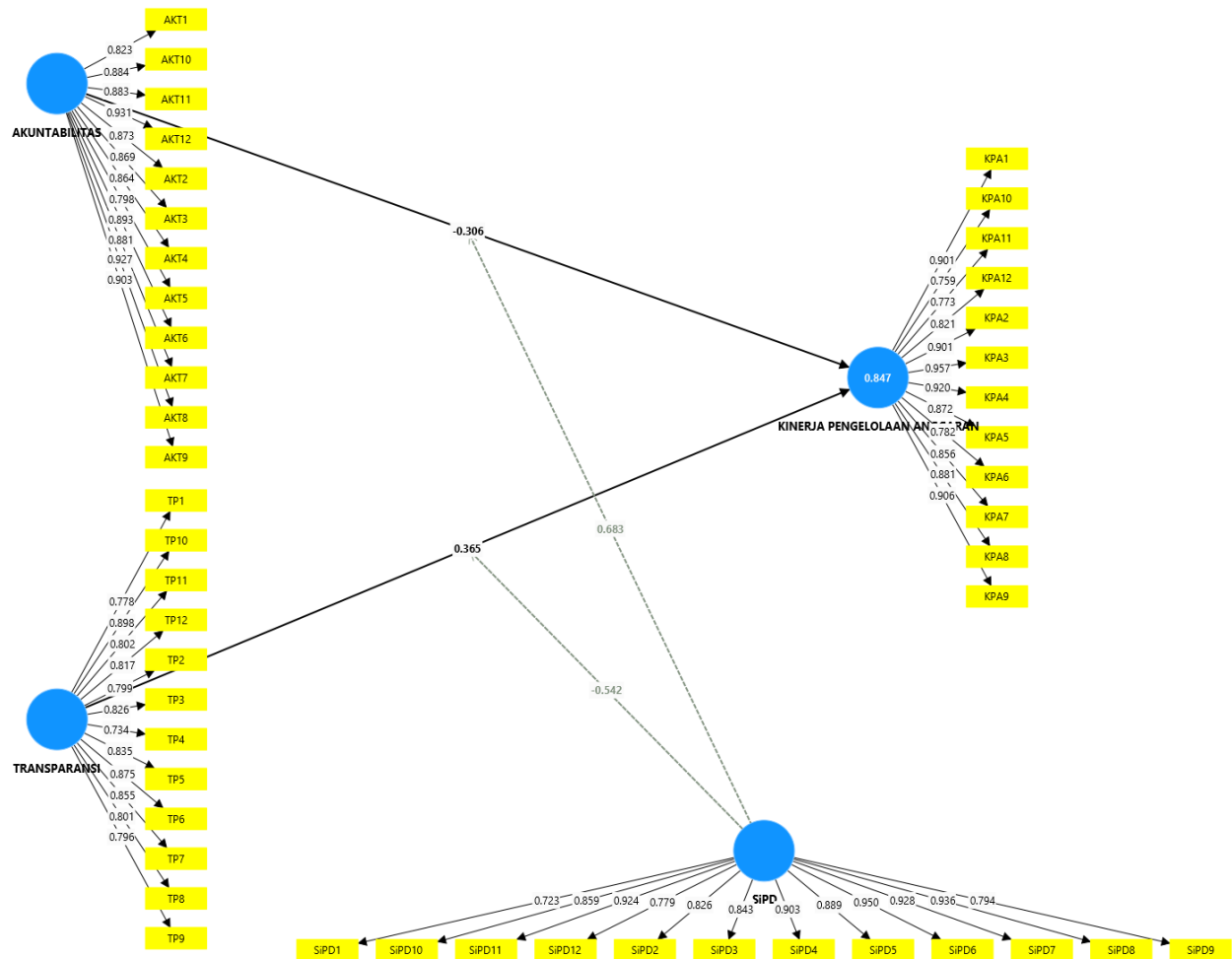
Lampiran 3. Kuesioner Transparansi

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kesesuaian Informasi						
1.	Informasi yang disampaikan oleh Bappelitbang terkait anggaran sesuai dengan kondisi sebenarnya.					
2.	Laporan kegiatan dan penggunaan anggaran disusun secara jelas dan mudah dipahami.					
3.	Informasi keuangan yang disampaikan telah mencakup seluruh komponen penting yang dibutuhkan publik.					
Akses Terhadap Informasi						
4.	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran.					
5.	Pemerintah daerah menyediakan platform yang memfasilitasi keterbukaan informasi anggaran.					
6.	Informasi kegiatan dan anggaran tersedia secara daring (online) dan dapat diakses kapan saja.					
Peningkatan Pengetahuan Publik Terhadap Kegiatan Pemerintahan						
7.	Informasi yang disampaikan pemerintah membantu masyarakat memahami proses perencanaan pembangunan.					
8.	Transparansi informasi telah mendorong partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.					
9.	Sosialisasi kegiatan dan anggaran dilakukan secara berkala kepada masyarakat.					
Peningkatan Kepercayaan Publik						
10	Sosialisasi kegiatan dan anggaran dilakukan secara berkala kepada masyarakat.					
11	Masyarakat merasa yakin bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.					
12	Keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih percaya terhadap program-program pemerintah.					

Lampiran 4. Kuesioner SiPD

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Keamanan Data						
1.	Sistem informasi pemerintah daerah (SiPD) memiliki fitur keamanan yang dapat mencegah akses ilegal.					
2.	Data anggaran dan perencanaan pembangunan tersimpan dengan aman dalam sistem.					
Kecepatan dan Ketepatan Waktu						
4.	SiPD memudahkan pegawai untuk mengakses data secara cepat saat dibutuhkan.					
5.	Proses input dan pemrosesan data dalam sistem dilakukan secara efisien dan tepat waktu.					
Ketelitian						
5.	SiPD dapat meminimalisir kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan data anggaran.					
6.	Hasil laporan yang dihasilkan dari sistem dapat diandalkan untuk keperluan audit dan evaluasi.					
Variasi Laporan						
7	SiPD mampu menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan dan kinerja sesuai kebutuhan.					
8	Laporan yang dihasilkan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari berbagai unit kerja.					
Relevansi Sistem						
9	Fungsi dalam sistem SiPD selaras dengan kebutuhan manajemen anggaran dan perencanaan pembangunan.					
10	Informasi yang disediakan oleh sistem relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.					
11	Sistem selalu diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi.					
12	SiPD memudahkan koordinasi antar unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.					

Lampiran 5. Outer Model



Lampiran 6. *Inner Model*

Final results					
Path coefficients					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
AKUNTABILITAS -> KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	-0.306	-0.387	0.423	0.725	0.001
SIPD -> KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.952	0.788	0.299	3.185	0.001
TRANSPARANSI -> KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.365	0.594	0.439	0.832	0.012
SIPD x TRANSPARANSI -> KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	-0.542	-0.266	0.558	0.971	0.020
SIPD x AKUNTABILITAS -> KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.683	0.403	0.592	1.153	0.033

Outer loadings					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
AKT1 <- AKUNTABILITAS	0.823	0.781	0.138	5.965	0.000
AKT10 <- AKUNTABILITAS	0.884	0.873	0.071	12.383	0.000
AKT11 <- AKUNTABILITAS	0.883	0.875	0.067	13.215	0.000
AKT12 <- AKUNTABILITAS	0.931	0.919	0.063	14.716	0.000
AKT2 <- AKUNTABILITAS	0.873	0.852	0.085	10.274	0.000
AKT3 <- AKUNTABILITAS	0.869	0.839	0.105	8.314	0.000
AKT4 <- AKUNTABILITAS	0.864	0.848	0.087	9.916	0.000
AKT5 <- AKUNTABILITAS	0.798	0.775	0.108	7.373	0.000
AKT6 <- AKUNTABILITAS	0.893	0.890	0.056	15.822	0.000
AKT7 <- AKUNTABILITAS	0.881	0.847	0.115	7.691	0.000
AKT8 <- AKUNTABILITAS	0.927	0.914	0.061	15.119	0.000
AKT9 <- AKUNTABILITAS	0.903	0.895	0.059	15.387	0.000
KPA1 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.901	0.902	0.032	27.783	0.000
KPA10 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.759	0.737	0.120	6.326	0.000
KPA11 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.773	0.768	0.085	9.085	0.000
KPA12 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.821	0.814	0.079	10.405	0.000
KPA2 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.901	0.903	0.036	24.904	0.000
KPA3 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.957	0.956	0.016	58.957	0.000
KPA4 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.920	0.921	0.030	30.982	0.000
KPA5 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.872	0.869	0.065	13.456	0.000
KPA6 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.782	0.766	0.115	6.833	0.000
KPA7 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.856	0.848	0.063	13.506	0.000
KPA8 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.881	0.882	0.048	18.239	0.000
KPA9 <- KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	0.906	0.903	0.041	22.252	0.000
SIPD1 <- SIPD	0.723	0.725	0.082	8.867	0.000
SIPD10 <- SIPD	0.859	0.848	0.066	13.072	0.000
SIPD11 <- SIPD	0.924	0.919	0.041	22.569	0.000
SIPD12 <- SIPD	0.779	0.755	0.113	6.880	0.000
SIPD2 <- SIPD	0.826	0.829	0.062	13.412	0.000
SIPD3 <- SIPD	0.843	0.824	0.136	6.213	0.000
SIPD4 <- SIPD	0.903	0.893	0.060	15.152	0.000
SIPD5 <- SIPD	0.889	0.889	0.053	16.927	0.000
SIPD6 <- SIPD	0.950	0.944	0.031	30.907	0.000



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Senin, 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan **wajib** memperbaiki:

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Penguji I :

Penguji II :

Salah satu bab di buat sesuai temuan penelitian

Penguji III :

Pembahasan di persingkat dan data di perbaiki reponder

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.
Pembimbing I
- 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.
Pembimbing II
- 3 Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.
Penguji I
- 4 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA
Penguji II
- 5 Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.
Penguji III



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Luthifah Hanifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050006

Prodi/Konsentrasi : Akuntansi/Sektor Publik

Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Sidang Tesis

Medan, Juli 2025

UMSU

Komisi Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing I

Pembimbing II

(Assoc. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> ✉ pps@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Program Studi : Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki kembali*

2.

3.

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Program Studi : Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. kesuaian petunjuk pengujian

2.

3.

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menandatangani surat ini, agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Program Studi : Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *lsmr belahay perlu diuraikan dgn kondisi
kll frekuensi*
2. *Pembahasan lsmr diulangi terdapat Riset
yg dicantumkan di bab 2*
- 3.

Penguji/Pembahas I

Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas I

Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> ✉ pps@umsu.ac.id 📠 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: LUTHFIAH HANIFAH
NPM	: 2320050006
Program Studi	: Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	: PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. bab 3 belum ada uji validitas dan reliabilitas
2. bab 3 populasi dan sampel di perbaiki
3. Deskripsi data di perbaiki

Penguji/Pembahas II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, 15 Juli 2025

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> ✉ pps@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: LUTHFIAH HANIFAH
NPM	: 2320050006
Program Studi	: Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	: PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Uraian kembali bab 3. uraian para survey*

2. *Pembahasan diperbaiki sesuai hasil dan temuan data. Buatlah uraian yg lebih berkualitas*

3. *Setiap uraian pembahasan dituliskan dgn CBM bab 1 dan uraian yg ditunjukkan*

Penguji/Pembahas III

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas III

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Luthfiah Hanifah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050016
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Dengan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi

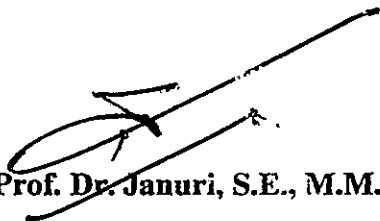
Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Seminar Proposal

Medan, 2025

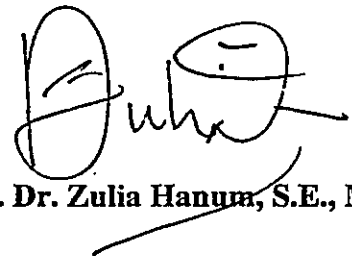
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Zulha Hanum, S.E., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Senin , tgl.17 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Mohon dikatahkan Ardan Pembimbing I*
- 2.
- 3.

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA., CERA.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

20/4'25.

Pembimbing I

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

3/Januri

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA., CERA.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Senin , tgl.17 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki sesuai dengan saran pengji*

2.

3.

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIU

Pada hari ini, Senin, tgl. 17 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Latar belakang harus menjelaskan fenomena riil di tempat penelitian
2. Tinjauan pustaka perlu ditambah penjelasan bibliografi dengan riset terdahulu
3. Populasi dan Sampel harus proporsional

Pembanding

Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembanding

Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar surat ini agar diberikan
tanggapan dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/Ak.Pp/PT/11/2024

Jl. Denal No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 40 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : LUTHFIAH HANIFAH
NPM : 2320050006
Prodi / Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
DI BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH (SPID) SEBAGAI VARIABEL
MODERASI
Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si
Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 10 Januari 2026, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 10 Rajab 1446 H
10 Januari 2025 M



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Peringgal.

